



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
I N S P E K T O R A T**

Jalan Basuki Rahmat No.05 Telp. (0527) 62002 - 61228 Kode Pos 71414 Amuntai

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Amuntai, 23 Maret 2022

Plt, Inspektur
Kabupaten Hulu Sungai Utara

FAHRUDIN, S.Hut., MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19691024 199603 1 005



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

<http://www.hsu.go.id/>

Kata Pengantar



Assalamualaikum Wr.Wb

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diukur atas dasar pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan

capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan dalam mewujudkan **Hulu Sungai Utara MANTAP** (Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif).

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Amuntai, Maret 2022

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



H. HUSAIRI ABDI, Lc

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Jumlah Indikator Perkelompok Tujuan dan Sasaran	II-4
Tabel 2.2	Tabel Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab.HSU Tahun 2017-2022.....	II-5
Tabel 2.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab.HSU Tahun 2017-2022.....	II-7
Tabel 2.4	Tabel Perjanjian Kinerja Kab.HSU Tahun Anggaran 2020.....	II-9
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	III-2
Tabel 3.2.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020.....	III-3
Tabel 3.3.	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2020.....	III-4
Tabel 3.4.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 1.....	III-6
Tabel 3.5.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 2	III-8
Tabel 3.6.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 3.....	III-9
Tabel 3.7.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 4	III-11
Tabel 3.8.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 5	III-12
Tabel 3.9.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 6	III-15
Tabel 3.10.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 7	III-16
Tabel 3.11.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 8	III-18
Tabel 3.12.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 9	III-20
Tabel 3.13.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 10	III-21
Tabel 3.14.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 11	III-22
Tabel 3.15.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 12	III-24
Tabel 3.16.	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Utama 13	III-25
Tabel 3.17.	Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	III-26
Tabel 3.18.	Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	III-28
Tabel 3.19.	Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	III-28
Tabel 3.20.	Analisis Pencapaian Sasaran 4.....	III-29
Tabel 3.21.	Analisis Pencapaian Sasaran 5.....	III-34
Tabel 3.22.	Analisis Pencapaian Sasaran 6.....	III-37
Tabel 3.23.	Analisis Pencapaian Sasaran 7.....	III-38

Tabel 3.24.	Analisis Pencapaian Sasaran 8.....	III-39
Tabel 3.25.	Analisis Pencapaian Sasaran 9.....	III-41
Tabel 3.26.	Analisis Pencapaian Sasaran 10.....	III-41
Tabel 3.27.	Analisis Pencapaian Sasaran 11.....	III-42
Tabel 3.28.	Analisis Pencapaian Sasaran 12.....	III-48
Tabel 3.29.	Analisis Pencapaian Sasaran 13.....	III-49
Tabel 3.30.	Analisis Pencapaian Sasaran 14.....	III-50
Tabel 3.31.	Analisis Pencapaian Sasaran 15.....	III-52
Tabel 3.32.	Analisis Pencapaian Sasaran 16.....	III-54
Tabel 3.33.	Analisis Pencapaian Sasaran 17.....	III-55
Tabel 3.34.	Analisis Pencapaian Sasaran 18.....	III-56
Tabel 3.35.	Analisis Pencapaian Sasaran 19.....	III-56
Tabel 3.36.	Analisis Pencapaian Sasaran 20.....	III-58
Tabel 3.37.	Analisis Pencapaian Sasaran 21.....	III-59
Tabel 3.38.	Laporan Realisasi APBD Tahun 2019	III-61
Tabel 3.39.	Tabel efisiensi program dan kegiatan tahun 2017-2019	III-64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	I-2
Gambar 1.2 Persentase Luas Kab. HSU Tahun 2011	I-2
Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	III-3
Gambar 3.2 Capaian Indikator Sasaran Kab. HSU Tahun 2020.....	III-5
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. HSU Tahun 2020.....	III-7
Gambar 3.4 Nilai PDRB Perkapita (ADHB) Kab. HSU.....	III-8
Gambar 3.5 Angka Harapan Hidup Kab. HSU	III-10
Gambar 3.6 Angka Rata-rata lama sekolah Kab. HSU	III-11
Gambar 3.7 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita di Kab. HSU.....	III-14
Gambar 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Kecil dan Menengah di Kab. HSU	III-15
Gambar 3.9 Angka Kemiskinan di Kab. HSU	III-17
Gambar 3.10 Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Sarana Jalan Dalam Kondisi Baik di Kab. HSU.....	III-19
Gambar 3.11 Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi di Kab. HSU.....	III-20
Gambar 3.12 Luas Sawah Yang Dapat Dialiri Irigasi di Kab. HSU.....	III-22
Gambar 3.13 Penduduk yang mengakses air Bersih di Kab. HSU.....	III-23
Gambar 3.14 Penduduk yang mempunyai sanitasi layak di Kab. HSU	III-24
Gambar 3.15 Angka partisipasi murni di Kab. HSU.....	III-31
Gambar 3.16 Angka partisipasi sekolah di Kab. HSU.....	III-32
Gambar 3.17 Angka partisipasi kasar di Kab. HSU.....	III-33
Gambar 3.18 Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kab HSU.....	III-36
Gambar 3.19 Prevalensi Gizi Buruk di Kab. HSU.....	III-37
Gambar 3.20 Laju pertumbuhan penduduk di Kab. HSU.....	III-40
Gambar 3.21 PDRB Sektor Pertanian di Kab. HSU.....	III-44
Gambar 3.22 Skor pola harapan (PPH) Konsumsi di Kab. HSU.....	III-49
Gambar 3.23 PDRB Sektor Pendukung UMKM di Kab. HSU.....	III-50
Gambar 3.24 PAD sektro pariwisata di Kab. HSU.....	III-51
Gambar 3.25 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. HSU.....	III-53
Gambar 3.26 Kawasan Kumuh Perkotaan di Kab. HSU.....	III-57
Gambar 3.27 Jumlah titik banjir di Kab. HSU.....	III-59



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Organisasi Pemerintahan	I-2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
A. Perencanaan.....	II-1
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-7
C. Perjanjian Kinerja	II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Pemkab HSU Tahun 2020..	III-2
3.2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020.....	III-61
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB

I

PENDAHULUAN**A. LATAR BELAKANG****S**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

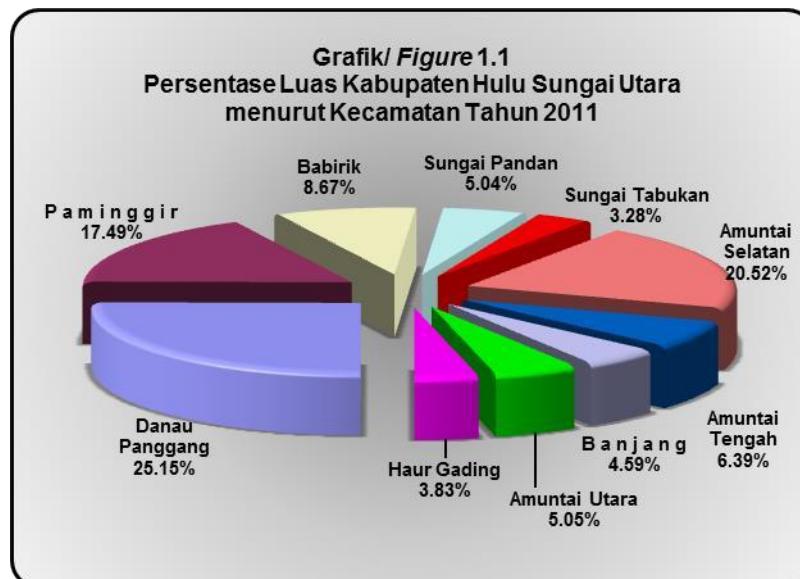
Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penetapan kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

B. ORGANISASI PEMERINTAHAN



Gambar 1.1 Peta Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai terbagi dalam 10 kecamatan dan terdapat seluruhnya 219 desa dan 5 kelurahan yang ada.



Gambar 1.2 Persentase Luas Kabupaten HSU Tahun 2011

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang ini.

Bupati Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil yang disebut Wakil Bupati Hulu Sungai Utara dan organisasi pemerintahan yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian dirubah menjadi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi masing – masing Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 10 tahun 2010 ;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 12 tahun 2011;
3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 23 tahun 2013 ;
4. Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 37 Tahun 2016 ;
5. Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 14 Tahun 2018 ;
6. Sekretariat Dewan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 15 Tahun 2018 ;
7. Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 16 Tahun 2018 ;
8. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 17 tahun 2018 ;
9. Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 18 Tahun 2018 ;
10. Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 19 Tahun 2018 ;

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 20 Tahun 2018 ;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 21 Tahun 2018 ;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 22 Tahun 2018 ;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 23 Tahun 2018 ;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 24 Tahun 2018 ;
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 25 Tahun 2018 ;
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 26 Tahun 2018 ;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 27 Tahun 2018 ;
19. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 28 Tahun 2018 ;
20. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 29 Tahun 2018 ;
21. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkunga Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 30 Tahun 2018 ;
22. Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 31 Tahun 2018 ;
23. Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 32 Tahun 2018 ;
24. Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 33 Tahun 2018 ;
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 34 Tahun 2018 ;
26. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 35 Tahun 2018 ;

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 36 Tahun 2018 ;
28. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 37 Tahun 2018 ;
29. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 38 Tahun 2018 ;
30. Kecamatan Amuntai Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 39 Tahun 2018 ;
31. Kecamatan Amuntai Utara berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 40 Tahun 2018 ;
32. Kecamatan Amuntai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 41 Tahun 2018 ;
33. Kecamatan Banjang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 42 Tahun 2018 ;
34. Kecamatan Haur Gading berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 43 Tahun 2018 ;
35. Kecamatan Sungai Pandan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 44 Tahun 2018 ;
36. Kecamatan Sungai Tabukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 45 Tahun 2018 ;
37. Kecamatan Babirik berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 46 Tahun 2018 ;
38. Kecamatan Danau Panggang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 47 Tahun 2018 ;
39. Kecamatan Paminggir berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 48 Tahun 2018.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

R

PJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-

2022 disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam prosesnya penyusunan RPJMD didasarkan atas berbagai kondisi dan permasalahan serta potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika dan perkembangannya.

Dokumen RPJMD tersebut kemudian menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD setiap tahunnya.

Rencana pembangunan tahun anggaran 2021 telah dituangkan dalam RKPD tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati **No. 30 Tahun 2020 Tanggal 16 Juli 2020**. RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2021 disajikan dalam bentuk prioritas, Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 tentunya tidak terlepas dan masih terkait dengan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025.

Secara garis besar, dalam upaya mencapai visi yang diemban Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah merumuskan:

- ✓ **5 (lima) misi,**
- ✓ **8 (delapan) tujuan,**
- ✓ **11 (sebelas) indikator tujuan,**
- ✓ **21 (duapuluhan satu) sasaran** dan
- ✓ **43 (empat puluh tiga) indikator kinerja**

A.1 VISI

Melihat pada kondisi, potensi, peluang dan tantangan yang ada, ditetapkan visi sebagai berikut :

***"Hulu Sungai Utara
MANTAP"***

Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS dan PRODUKTIF.

A.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan 5 (lima) Misi yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

MISI 1	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif
MISI 2	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah
MISI 3	Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah
MISI 4	Membangun infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal
MISI 5	Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

A.3 Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan yang akan dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022 pada dasarnya adalah penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang baik pada aspek ekonomi, aspek sosial dan berbagai hal lainnya dalam suasana kehidupan keagamaan dan sosial yang kondusif. Selain itu juga adanya komitmen untuk taat dan patuh terhadap hukum dan aturan perundangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Secara sosial dan ekonomi diinginkan adanya perbaikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat (SDM) yang merupakan tujuan mendasar dan dilakukan secara bertahap terhadap aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan pengembangan wilayah, aspek pemberdayaan masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal juga penting yang ditujukan untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai tahun 2022 dirumuskan dengan :

- ✓ **8 (delapan) tujuan,**
- ✓ **11 (sebelas) indikator tujuan,**
- ✓ **21 (duapuluhan satu) sasaran** dan
- ✓ **43 (empat puluh tiga) indikator kinerja**

Adapun rincian tujuan dan sasaran tersebut yang dibagi berdasarkan Misi-misi yang diemban Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Jumlah Indikator Perkelompok Tujuan dan Sasaran

Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran
Misi 1	2	2	3	5
Misi 2	3	5	7	18
Misi 3	1	2	6	9
Misi 4	1	1	3	7
Misi 5	1	1	2	4
Jumlah	8	11	22	43

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Secara lebih khusus atas berbagai misi daerah yang ditetapkan maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Misi I : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif			
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah	Percentase PAD/ Total Pendapatan Daerah (%)	Meningkatnya kapasitas fiskal/pembiayaan daerah	Pertumbuhan PAD (%)
Misi II : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah			
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata lama sekolah (tahun) '- Harapan Lama sekolah '- Usia Harapan Hidup (tahun) 	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) - APM SMP/MTs/Paket B (%) - Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> jumlah Kematian Ibu (orang) Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi gizi buruk

		Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif
		Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender Rasio KDRT Tingkat Capaian Status Kabupaten Layak Anak
		Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
4. Meningkatkan Prestasi Olahraga	Peringkat Kab. HSU di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Prestasi olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan medali di kejuaran provinsi (cabang)
5. Memelihara kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif	Jumlah Kejadian berlatar belakang konflik SARA	Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis	Jumlah Kejadian berlatar belakang konflik SARA
Misi III : Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah			
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	-Pendapatan Perkapita (Rp) '-Laju Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya hasil-hasil produksi pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp)
		Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Kkal/Kapita/Th): -Total Energi (kkal) -Total Protein (gram) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
		Berkembangnya peran ekonomi kreatif Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)	PDRB Sektor industri pengolahan PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
		Meningkatnya sektor pariwisata	PAD sektor Pariwisata (Juta Rp)
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)
Misi IV : Membangun infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal			
7. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik (%)

		Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)
		Persentase wilayah yang terhubung dengan jaringan komunikasi (%)
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman
		Penduduk yang mengakses Air Bersih (%)
		Pengurangan kawasan Kumuh Perkotaan (%)
		Penduduk yang memiliki sanitasi layak (%)

Misi V : Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengurangan lokasi banjir	Penurunan Titik Banjir
		Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan	Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW (%)
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Kualitas Air

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 22 Juni 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022

No .	Indikator	Target Tahun				
		2019	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.45	5.70	5.95	6.00	6.00
2	Pendapatan Perkapita (Rp)	18,283,500	19,537,750	20,792,000	22,046,250	23,300,500

3	Usia Harapan Hidup (tahun)	63.07	63.25	63.43	63.61	63.79
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7.18	7.30	7.43	7.55	7.66
5	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Kkal/Kapita/Th) : -Total Energi (kkal) -Total Protein (gram)	3.471 84.51	3.511 85.47	3.592 86.44	3.633 87.43	3.633 88.43
6	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	7,28	7,3	7,32	7,35	7,35
7	Persentase penduduk miskin (%)	6.42	6.19	5.96	5.73	5.5
8	Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik (%)	67.12	68.95	70.32	71.69	72.61
9	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	94.52	94.98	95.43	95.89	96.35
10	Luas sawah yang dapat diairi irigasi (Ha)	6,150.00	6,250.00	6,350.00	6,450.00	6,500.00
11	Penduduk yang mengakses Air bersih (%)	82.26	86.32	90.84	96.81	100
12	Penduduk yang mempunyai sanitasi layak (%)	70.50	79.39	85.72	93.91	100
13	Indeks Kualitas Air	45	45	45	45	45

Adapun Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2021 sesuai dengan disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1	Nilai SAKIP Kabupaten	B	
		2	Opini BPK	WTP	
		3	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	
2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.50	%
3	Meningkatnya kapasitas fiskal/pembentukan daerah	5	Pertumbuhan PAD	18.88	%
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan	6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	%
		7	APM SMP/MTs/Paket B	83.12	%
		8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	100	%
		9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	98.14	%
		10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100	%
		11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	97.73	%
		12	Angka Kelulusan SD/MI	100	%
		13	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	%
		14	Jumlah Kematian Ibu (orang)	2	Orang
		15	Angka Kematian Bayi (AKB)	17	
		16	Prevalensi gizi buruk	5	
6	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	17	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif	26.48	%

7	Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak	18	Indeks Pemberdayaan Gender	64.84	
		19	Rasio KDRT	0.012	
		20	Tingkat Capaian Status Kabupaten Layak Anak	800	
8	Menebak Laju Pertumbuhan Penduduk	21	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.3	%
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	22	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan medali di kejuaraan provinsi	22	cabang
10	Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis	23	Jumlah Kejadian berlatar belakang konflik SARA	0	
11	Meningkatnya produksi hasil-hasil pertanian, Peternakan, dan Perikanan	24	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	524.794,34	Rp
12	Meningkatkan ketahanan pangan daerah		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Kkal/Kapita/Th):		
		25	-Total Energi	3,633	kkal
		26	-Total Protein	87,43	gr
		27	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,00	
13	Berkembangnya peran ekonomi kreatif Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM)	28	PDRB Sektor industri pengolahan	366.607,79	
		29	PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	513.694,04	
14	Meningkatnya sektor pariwisata	30	PAD sektor Pariwisata (Juta)	173,00	Rp
15	Menurunnya Angka Pengangguran	31	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.1	%

16	Menurunnya Angka Kemiskinan	32	Persentase penduduk miskin	5,73	%
17	Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah	33	Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik	71,69	%
		34	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	95,89	%
		35	Persentase wilayah yang terhubung dengan jaringan komunikasi	60	%
18	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan	36	Luas sawah yang dapat diairi irigasi	6,450	Ha
19	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	37	Penduduk yang mengakses Air Bersih	96,81	%
		38	Pengurangan kawasan Kumuh Perkotaan	48,57	%
		39	Penduduk yang memiliki sanitasi layak	93,91	%
20	Pengurangan lokasi banjir	40	Penurunan titik banjir	174	
21	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan	41	Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW	99.95	%
		42	Indeks Kualitas Udara	70,00	
		43	Indeks Kualitas Air	45	



AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan laporan Akuntabilitas Kinerja yang wajib dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pelaksana kebijakan pembangunan di wilayah kewenangannya. Laporan ini tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan, yaitu sejak perencanaan dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja dan selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dalam tahun anggaran 2021, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja Tahun Keempat dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, yang start perencanaannya dimulai tahun 2018. Target tahun keempat RPJMD ini selanjutnya dituangkan sebagai target kinerja pada RKPD Tahun 2021. Namun karena kondisi pandemic covid-19, beberapa target indicator pada RKPD 2021 diturunkan dari target RPJMD tahun keempat. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja dari tujuan dan sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran. Untuk keutuhan

informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja tahun 2021.

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. HSU TAHUN 2021

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun capaian kinerja sasaran secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulai dari misi, tujuan, dan sasaran beserta dengan indikatornya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerjanya digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil (SB)
II	$100\% \leq 90\%$	Berhasil (B)
III	$89\% \leq 70\%$	Cukup Berhasil (CB)
IV	< 70%	Kurang berhasil (KB)

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022, total keseluruhan indikator yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah **14 (Empat Belas) indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **43 (Empat Puluh Tiga) indikator kinerja sasaran** dengan rincian sebagai berikut :

- Misi I terdiri dari 2 tujuan, 3 sasaran, dan 5 indikator sasaran;
- Misi II terdiri dari 3 tujuan, 7 sasaran, dan 18 indikator sasaran;
- Misi III terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran, dan 9 indikator sasaran;
- Misi IV terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran, dan 7 indikator sasaran;
- Misi V terdiri dari 1 tujuan, 2 sasaran, dan 4 indikator sasaran.

Secara umum realisasi sampai akhir tahun 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran dengan kategori "sangat berhasil" dan "berhasil" masih lebih banyak daripada kategori "cukup berhasil" dan "kurang berhasil".

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target IKU dan indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selanjutnya juga akan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya. Setiap Misi mempunyai Tujuan dan Sasaran masing-masing, dimana indikator tujuan hanya ditargetkan di akhir periode RPJMD 2017-2022. Selain indikator sasaran

strategis juga ada indikator kinerja utama yang target per tahunnya juga telah dicantumkan di dalam RPJMD 2017-2022.

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	5	37.71
2	Berhasil	5	37.71
3	Cukup Berhasil	1	7.14
4	Kurang Berhasil	3	21.43
	Jumlah	14	100.00



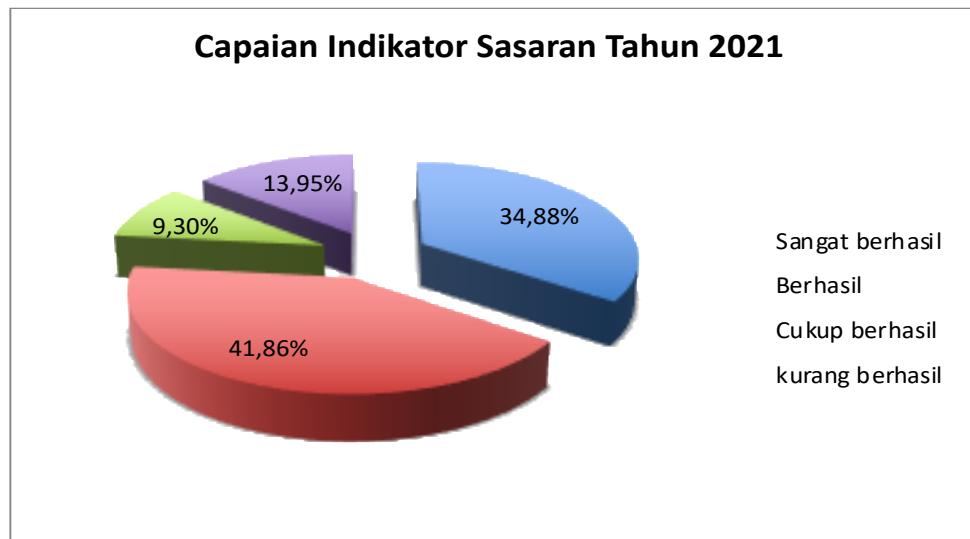
Gambar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kab. HSU tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat hasil pengukuran pencapaian IKU Kab. HSU Tahun 2021 yang terdiri dari 14 indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian hasil paling dominan adalah kategori sangat berhasil (35.71%) dan berhasil (35.71%), kemudian kategori kurang berhasil (21.43%) dan cukup berhasil 7,14%. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target pada perencanaan tahun keempat ini setelah beberapa disesuaikan targetnya pada RKPD 2021 dinilai cukup relevan dengan kondisi yang ada dikarenakan kondisi pandemic Covid 19 yang belum berakhir. Data yang ditampilkan adalah data capaian tahun 2021 yang bersumber dari BPS maupun SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya. Hanya ada satu data yang merupakan data tahun 2020 yaitu pendapatan perkapita, karena BPS belum mengeluarkan data ini untuk

tahun 2021. Namun demikian Pemerintah Daerah diharapkan tetap optimis untuk bisa mencapai kinerja lebih baik pada tahun berikutnya.

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (5 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Berhasil	1	20.00
2	Berhasil	4	80.00
3	Cukup Berhasil	0	0.00
4	Kurang Berhasil	0	0.00
	Jumlah	5	100.00
Misi II (18 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Berhasil	6	33.33
2	Berhasil	7	38.89
3	Cukup Berhasil	2	11.11
4	Kurang Berhasil	3	16.67
	Jumlah	18	100.00
Misi III (9 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Berhasil	3	33.33
2	Berhasil	1	11.11
3	Cukup Berhasil	2	22.22
4	Kurang Berhasil	3	33.33
	Jumlah	9	100.00
Misi IV (7 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Berhasil	3	42.86
2	Berhasil	4	57.14
3	Cukup Berhasil	0	0.00
4	Kurang Berhasil	0	0.00
	Jumlah	7	100.00
Misi V (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Berhasil	2	50.00
2	Berhasil	2	50.00
3	Cukup Berhasil	0	0.00
4	Kurang Berhasil	0	0.00
	Jumlah	4	100.00



Gambar 3.2. Capaian Indikator Sasaran Kab. HSU tahun 2020

Dari grafik terlihat hasil capaian pengukuran Indikator sasaran Kab. HSU tahun 2021 yang terdiri dari 21 sasaran dengan 43 indikator kinerja menunjukkan bahwa hasil capaian paling dominan adalah kategori berhasil (41,86%), kemudian sangat berhasil (34,88%), kurang berhasil (13,95%), dan cukup berhasil (9,30%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun keempat periode RPJMD masih ada sekitar 25% yang capaiannya dinilai kurang berhasil karena di bawah 70%. Kategori ini yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi kemungkinan karena capaian yang memang sangat rendah atau adanya kekeliruan data atau perhitungan yang dilakukan. Berbagai masalah atau kendala capaian dijelaskan secara rinci pada target capaian per Misi RPJMD pada halaman berikutnya.

Seperti halnya indikator kinerja utama, data yang ditampilkan adalah data capaian tahun 2021 yang bersumber dari BPS maupun SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya. Hanya ada beberapa data yang merupakan data tahun 2020 karena BPS belum mengeluarkan data ini untuk tahun 2021.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. HSU TAHUN 2021

3.2.1. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

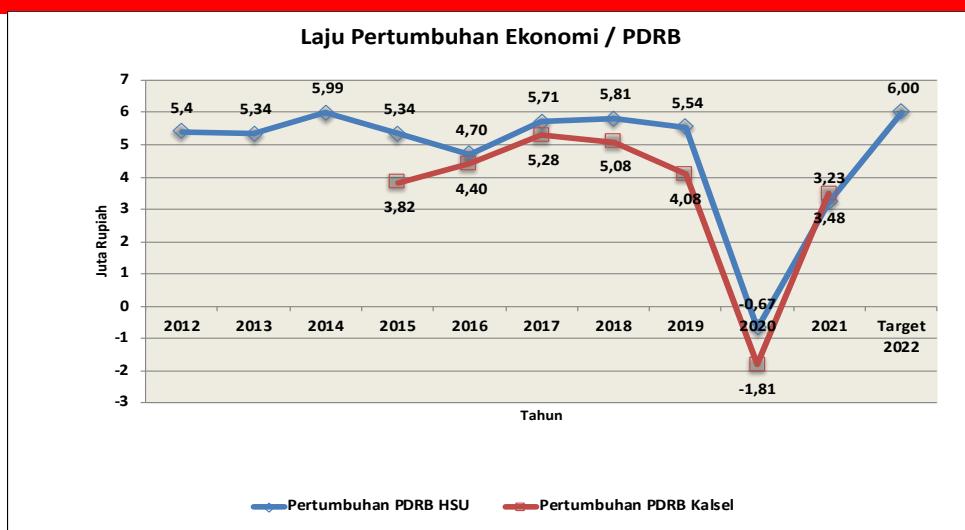
yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Tabel 3.3.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 1

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,00	3,50	3,23	92,29	53,83

Pertumbuhan ekonomi Kab. HSU pada tahun 2021 adalah 3,23%. Jika dihitung berdasarkan target RKPD 2021 maka dinilai berhasil karena capaiannya lebih dari 90%. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD untuk tahun 2021 (sama dengan target tahun 2022) yang sebesar 6,00% maka capaiannya dinilai kurang berhasil. Target pertumbuhan ekonomi ketika menyusun RKPD tahun 2021 diturunkan dari target RPJMD karena melihat kondisi tahun sebelumnya yang tidak tumbuh (negative) yang diakibatkan kondisi pandemi covid 19. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua Kab/Kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor.

Pertumbuhan ekonomi yang kembali positif di tahun 2021 menunjukkan menggeliatnya kembali ekonomi riil wilayah Kab. HSU secara khusus dan wilayah kalsel maupun nasional secara umum. Ini juga menunjukkan share Kab. HSU cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi Prov. Kalsel dan pertumbuhan ekonomi Kab. HSU tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi dalam wilayah yang lebih luas. Ke depannya perlu usaha-usaha maupun kebijakan-kebijakan untuk terus membangkitkan ekonomi masyarakat, baik kebijakan di tingkat regional wilayah maupun nasional. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kab. HSU dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 3.3. Laju pertumbuhan Ekonomi Kab. HSU

Berdasarkan grafik di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama satu dasawarsa terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi sempat mencapai angka 6.40% pada tahun 2011 dan 5,99% pada tahun 2014, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami perlambatan. Di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan mencapai 5,81% dan tahun 2019 kembali terjadi sedikit penurunan. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih positif di kisaran 5%-6% yang artinya masih ada peningkatan kesejahteraan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.67%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua Kab/Kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021 perekonomian kembali tumbuh positif sebesar 3,23%.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang di tengah pandemi yang belum berakhir ini perlu peningkatan program pembangunan bidang ekonomi dengan mencari terobosan-terobosan baru yang mempunyai potensi namun belum tumbuh dengan baik, sehingga kondisi perekonomian daerah bisa pulih kembali. Selain itu pertumbuhan ekonomi ini juga erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi.

b. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dapat menggambarkan rata-rata pendapatan riil yang diterima oleh setiap penduduk di suatu daerah selama periode tertentu dengan asumsi aset ekonomi yang ada merupakan milik penduduk lokal. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu

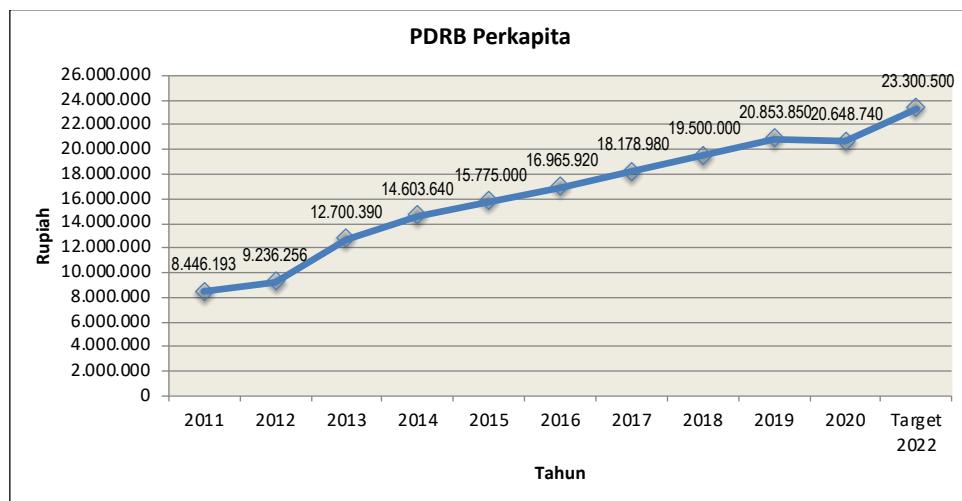
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

orang penduduk. Adapun PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Tabel 3.4.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pendapatan Perkapita	Rp	23,300,500	20,792,000	20,853,850	94,72	88,62

Pendapatan perkapita penduduk Kab. HSU pada tahun 2020 (Angka BPS untuk Tahun 2021 belum tersedia) menunjukkan angka di atas 90%. Ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk sudah berhasil meskipun belum mencapai target, dan jika perkembangannya seperti ini terus maka optimis target akhir periode RPJMD tahun 2022 dapat tercapai. Adapun perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kab. HSU secara time series dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.4. Nilai PDRB Perkapita (ADHB) Kab. HSU

Jika dilihat dari Pendapatan Perkapita (ADHB) terlihat meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020. Kenaikan Pendapatan Perkapita lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan jumlah penduduk dalam setahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan ril penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat. Namun untuk pendapatan ril di tahun 2020 ada agak sedikit menurun karena kondisi pandemi covid 19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat juga melemah.

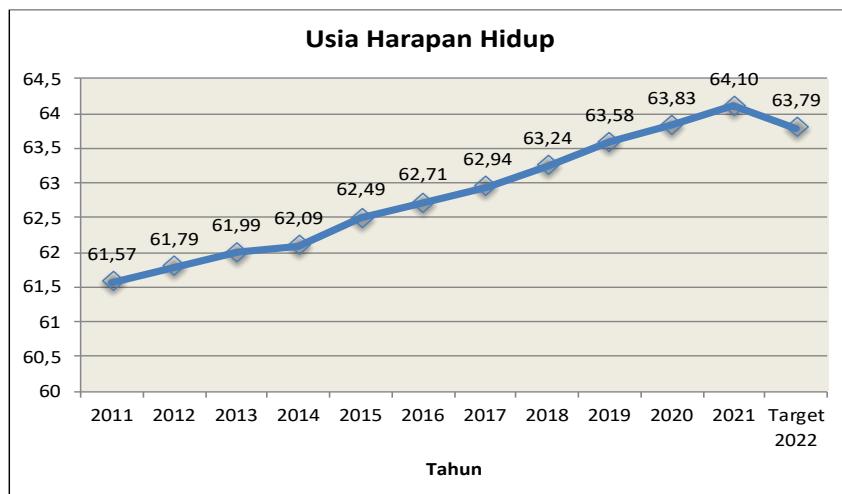
c. Usia Harapan Hidup

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Usia Harapan Hidup (AHH). Angka ini juga ikut berkontribusi untuk menentukan nilai IPM suatu wilayah dari sisi kesehatan. Target dan Capaian AHH Kab. HSU pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 3

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Usia Harapan Hidup	tahun	63.79	63.55	64.10	100.87	100.49

Angka Usia Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH Kab. HSU telah berhasil melebihi target pada tahun 2021 dan telah melebihi target RPJMD tahun 2022. Perkembangan AHH Kab. Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.5. Angka Harapan Hidup Kab. HSU

Terlihat trend yang meningkat pada Angka Harapan Hidup Kab. HSU mulai tahun 2011 sampai tahun 2021 seperti terlihat pada Gambar di atas. Peningkatan terjadi cukup lambat, namun terus positif. Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dijaminnya seluruh masyarakat Kab. HSU dengan BPJS

Kesehatan, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

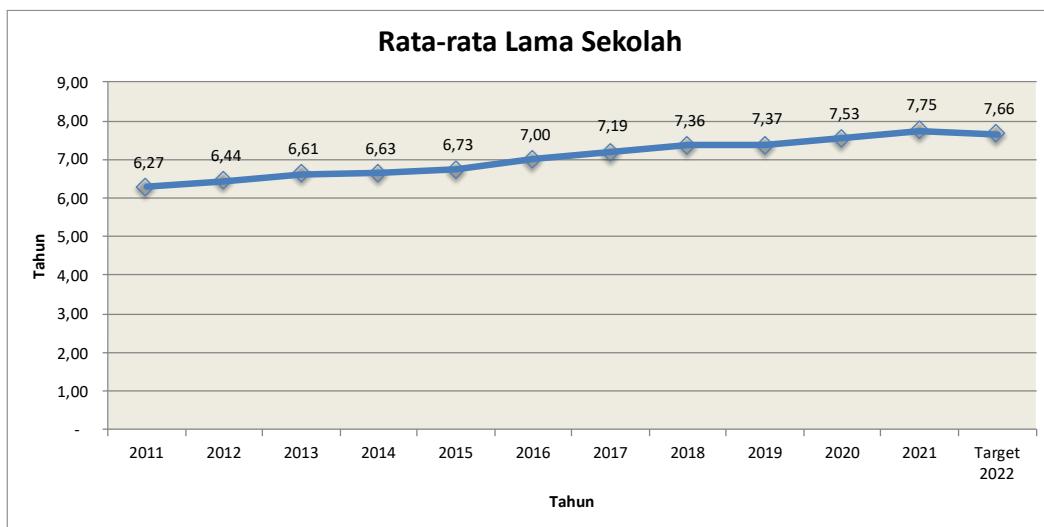
Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

**Tabel 3.6.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 4**

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7.66	7.55	7.75	102.65	101.17

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator ini telah melebihi target 2021 atau dinilai sangat berhasil dan optimis akan bisa mencapai target akhir RPJMD tahun 2022. Angka rata-rata lama sekolah 7,75 tahun ini bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTs atau kelas 8 semester 2. Ini artinya belum selesai wajib belajar 9 tahun. Pencapaian ini perlu terus ditingkatkan karena Standar UNDP untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun, yang artinya setara dengan Diploma III. Berikut perkembangan rata-rata lama sekolah di kab. HSU.



Gambar 3.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab. HSU

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariatif. Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal. Hal yang terpenting sebenarnya tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, harus ada konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang.

Pencapaian rata-rata lama sekolah yang selalu meningkat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Tersedianya pendidikan non formal berupa Paket B dan C di setiap kecamatan.
2. Berdirinya beberapa Perguruan Tinggi Swasta di kabupaten Hulu Sungai Utara seperti STAI Rakha, STIQ Rakha, STIA Amuntai maupun STIPER Amuntai.
3. Di buka Universitas Terbuka (UT) turut membantu siswa yang bekerja untuk melanjutkan kuliah maupun para pegawai PNS atau Non PNS yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan maupun untuk lineraritas.

e. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehat, aktif, dan berproduktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan meliputi 4 jenis hal, yaitu Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, serta Penanganan Kerawanan Pangan. Berikut adalah capaian ketersediaan pangan untuk energi dan protein perkapita.

Tabel 3.7.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 5

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	-Total Energi	Kkal/kapita/tahun	3.633	3.592	2.491	68.57	68.57
	-Total Protein	Gram/kapit/tahun	88,43	87.43	60.74	69.47	68.69

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan energi di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena untuk ketersediaan pangan sangat tergantung dengan produksi pangan penghasil energi seperti padi. Pada tahun 2021 produksi padi menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan energy. Namun jika dilihat dengan standar minimal Ketahanan Pangan, Ketersedian Energi adalah sebesar 2.400 kkal/kap/hari, dan ini sudah terpenuhi.

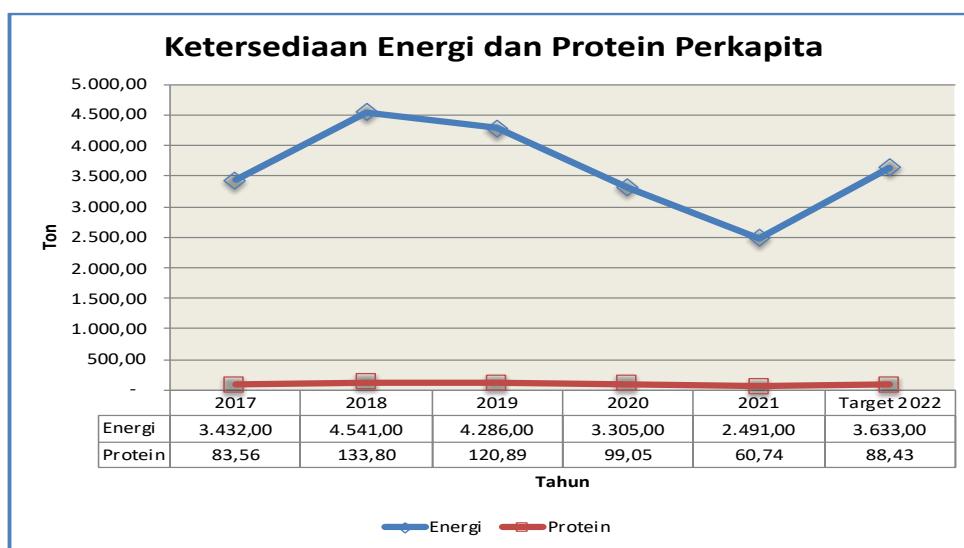
Adapun untuk ketersediaan protein belum mencapai target yang ditetapkan atau dinilai kurang berhasil. Apalagi jika dilihat dengan standar minimal Ketahanan Pangan yaitu untuk Ketersedian Protein sebesar 63 gr/kap/hari. Hal ini disebabkan karena untuk ketersediaan pangan sangat tergantung dengan produksi pangan penghasil protein di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu perikanan dan peternakan.

Kondisi ketersedian pangan yang cukup pada tingkat kecamatan dan kabupaten tidak secara otomatis menunjukkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat individu maupun rumah tangga. Kerawanan pangan bisa terjadi dalam kondisi ketersedian pangan yang cukup tetapi kemampuan memperoleh pangannya tidak cukup. Hal ini bisa dilihat dari analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan setiap bulan yang menunjukkan

bahwa hampir semua Kecamatan berada pada kategori rawan pangan (Merah).

Dalam Analisa SKPG, Aspek yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu ; Ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyebabkan rawan pangan lebih pada aspek pemanfaatan pangan. Berdasarkan hasil analisa SKPG yang dilaksanakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerawanan pangan adalah Aspek Pemanfaatan Pangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor daya beli masyarakat, budaya, dan pengetahuan tentang gizi yang masih kurang.

Secara time series ketersediaan energy dan protein perkapita dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.7. Ketersediaan energi dan protein perkapita di Kab. HSU

Berdasarkan grafik terlihat bahwa pada tahun pertama RPJMD ketersediaannya cukup tinggi, namun kemudian terlihat menurun mulai tahun 2019 hingga 2021. Hal ini disebabkan oleh produksi pangan penghasil kalori (padi) dan protein (ikan, temak, dll) yang juga menurun, apalagi pada tahun 2020 sangat terlihat sekali imbas dari kondisi pandemi covid 19.

f. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

Industri kecil menengah merupakan salah satu lapangan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Hulu Sungai Utara. Sektor ini juga yang banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Tabel 3.8.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 6

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	7.35	6.00	8.90	148.33	121.09

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian realisasi untuk pertumbuhan industri kecil menengah telah melebihi target yang ditetapkan tahun 2021 dan telah melebihi target akhir RPJMD tahun 2022. Salah satu penyebabnya adalah karena memang masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup besar persentasenya yang menggantungkan hidup dari sektor ini, dan terbukti bahwa UMKM ini yang dapat bertahan di tengah kondisi pandemi Covid 19 seperti sekarang. Pertumbuhan IKM dari tahun ke tahun terlihat sebagai berikut.

Dari grafik terlihat pertumbuhan industri kecil menengah di Kab. HSU selama lima tahun terakhir terlihat ada peningkatan. Dari tahun 2017-2020 peningkatannya cukup kecil, namun pada tahun 2021 terlihat lonjakan pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini artinya IKM semakin tumbuh di masa pandemi pada tahun 2021 ini. IKM ini kebanyakan bergerak di bidang kerajinan seperti kerajinan purun, enceng gondok, kursi, lemari dan perabotan rumah lainnya. Selain itu banyak juga industri pengolahan dari hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.



Gambar 3.8. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Kab. HSU

g. Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Berikut data kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

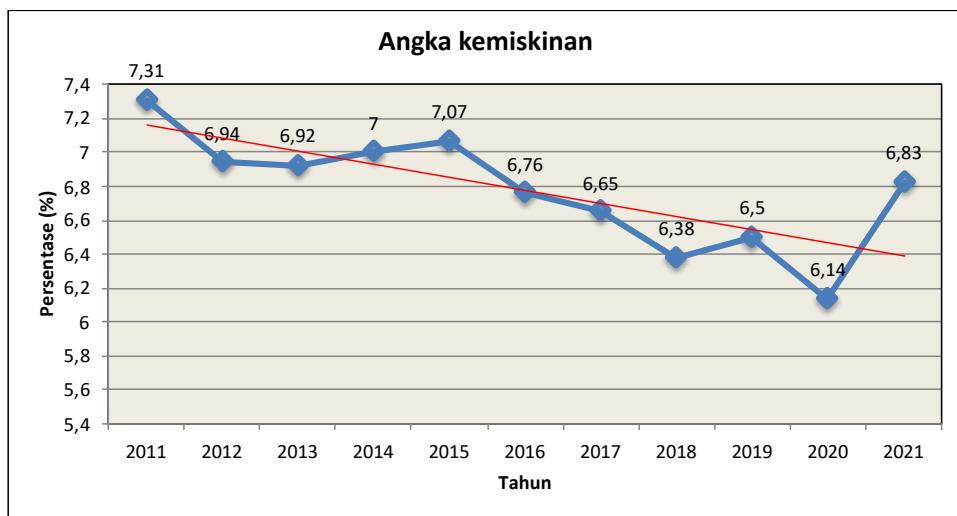
Tabel 3.9.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 7

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase penduduk miskin	%	5.50	7.00	6.83	102.43	75.82

Persoalan Kemiskinan dipengaruhi berbagai bidang, salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah bidang ketenagakerjaan. Ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja merupakan hal penting yang sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Banyak sedikitnya penduduk yang bekerja akan mempengaruhi jumlah dan persentase kemiskinan di suatu daerah. Hal-hal yang mendorong penciptaan lapangan kerja diharapkan dapat menurunkan persentase kemiskinan serta berkurangnya jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Target dan capaiannya seperti table di atas.

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 6,83%. Jika dihitung berdasarkan target RKPD 2021 (sebesar 7,00%) maka dinilai sangat berhasil karena capaiannya lebih dari 100%. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD untuk tahun 2021 yang sebesar 5,73% maka capaiannya dinilai cukup berhasil karena hanya sekitar 80%. Target persentase penduduk miskin ketika menyusun RKPD tahun 2021 diturunkan dari target RPJMD karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi covid 19. Selanjutnya jika dilihat potensi pencapaian target akhir RPJMD tahun 2022 yang masih sekitar 75%, maka mengharuskan upaya yang lebih intensif dan

fokus lagi untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Pencapaian indikator ini apabila dibandingkan secara time series diperoleh gambaran seperti gambar berikut.



Gambar 3.9. Angka Kemiskinan Kab. HSU

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 7,31% pada tahun 2011 terus menurun dari tahun ke tahun, hingga menjadi 6,92% pada tahun 2013, namun sedikit menaik pada tahun 2014 dan 2015. Jumlah penduduk miskin yang cenderung meninggi pada tahun ini salah satunya disebabkan oleh kondisi banjir yang menyebabkan gagal panen pada usaha pertanian penduduk, yang merupakan salah satu penyokong perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tahun 2016 turun signifikan dan terus menurun hingga tahun 2018. Salah satu faktor pendorong penurunan angka kemiskinan adalah dana desa yang diluncurkan pemerintah dan jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, rastra) yang terus diperbaiki cakupannya oleh pemerintah.

Tahun 2019 terjadi sedikit kenaikan angka kemiskinan menjadi 6,50%. Hal yang sama juga terjadi untuk Prov. Kalimantan Selatan dan beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Terjadinya kenaikan penduduk miskin kemungkinan besar disebabkan oleh turunnya level masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun dengan sedikit saja gejolak ekonomi bisa membuat mereka berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 6,14, namun kembali menaik tahun 2021. Hal ini kemungkinan disebabkan kondisi Pandemi Covid 19 selama 2 tahun terakhir yang menyebabkan ekonomi belum stabil. Tahun 2020 terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi karena banyaknya bantuan langsung masyarakat yang dikucurkan Pemerintah,

namun bantuan terus dikurangi di tahun 2021 sementara harga kebutuhan pokok meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya jumlah penduduk miskin kembali meningkat. Untuk itu diperlukan usaha-usaha dan program kegiatan yang inovatif untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ini.

h. Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk memudahkan aksebilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain diperlukan peningkatan pembangunan jalan. Panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 391.541 km yang terdiri dari jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan Negara. Jalan-jalan inilah yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Berikut persentase desa yang terhubung dengan jalan dalam kondisi baik.

Tabel 3.10.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 8

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik	%	72.61	71.69	73.97	103.18	101.87

Pencapaian kinerja indikator ini pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan atau dinilai sangat berhasil. Terhadap capaian RPJMD juga telah mendekati 100%. Hal ini terbilang sangat positif karena telah tercapai pada tahun keempat RPJMD. Realisasi capaian kinerja yang melebihi target disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Adanya program dana desa dimana untuk perbaikan jalan desa lebih banyak ditangani oleh desa itu sendiri sehingga membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam memenuhi pencapaian kinerja utama;
- Adanya Dana Alokasi Khusus yang sangat membantu untuk pelaksanaan infrastruktur fisik;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Adanya tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dari yang dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Perubahan APBD Tahun 2019;
- Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak selesai ataupun berjalan dengan denda;
- Sosialisasi pemahaman tentang koordinasi, kerjasama, *sharing cost* tentang pembangunan desa dengan aparat pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sehingga kedepan akan lebih dimantapkan.

Berikut perkembangan kondisi desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik.



Gambar 3.10. Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik di Kab. HSU

i. Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi

Prasarana sistem transportasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah moda transportasi darat dan transportasi sungai. Prasarana transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terminal tipe B dan tipe C. Satu terminal tipe B yaitu Terminal Banua Lima yang pengelolaannya saat ini adalah kewenangan Provinsi, sedangkan sarana terminal tipe C ada 5 yang menjadi kewenangan Kab. HSU.

Tabel 3.11.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 9

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	

1	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	%	96.35	95.89	95.89	100.00	99.52
---	---	---	-------	-------	-------	--------	-------

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan telah hampir mencapai target RPJMD. Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang terhubung dengan moda transportasi darat, sungai dan danau dibagi dengan jumlah seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jumlah desa yang terhubung dengan moda transportasi berjumlah 210 desa dari target seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 219 desa. Keterhubungan transportasi ini bisa dengan seluruhnya jalan darat, seluruhnya jalur sungai, atau keduanya lewat darat dulu kemudian lewat sungai. Berikut perkembangannya.



Gambar 3.11. Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi

j. Luas sawah yang dapat diairi irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai luasan 25.131 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian. Sawah yang bisa dialiri irigasi dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 10

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Luas sawah yang dapat diairi irigasi	Ha	6500.00	6.450	6.450	100	99.23

Pencapaian kinerja pada indikator ini mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan tahun 2021 yaitu sebesar 100% atau dinilai berhasil. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 6.603 Ha, maka terjadi penurunan pencapaian kinerja sebesar 153 Ha di tahun 2021. Sedangkan jika dilihat capaian terhadap target akhir RPJMD hampir tercapai di tahun 2021, padahal sebelumnya sudah melebihi target. Hal ini terjadi kemungkinan besar karena wilayah yang sebelumnya sudah dapat aliran irigasi kembali tidak dapat dialiri irigasi karena lahannya tidak dimanfaatkan (lahan tidur) dan saluran-saluran Kembali tertutup. Hal ini karena irigasi yang ada di Kab. HSU bukan irigasi teknis, namun irigasi setengah teknis dan irigasi dalam bentuk Polder.



Gambar 3.12. Luas sawah yang dapat dialiri irigasi

Secara time series dapat dilihat perkembangannya sebagaimana grafik di atas. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat luasan sawah yang dapat dialiri irigasi semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD teknis untuk memperbaiki pengaturan air sawah memberikan hasil positif untuk meningkatkan produksi padi dan tanaman lainnya. Adanya sedikit penurunan di tahun 2021 dapat dipahami seperti

penjelasan di atas.

k. Penduduk yang mengakses air bersih

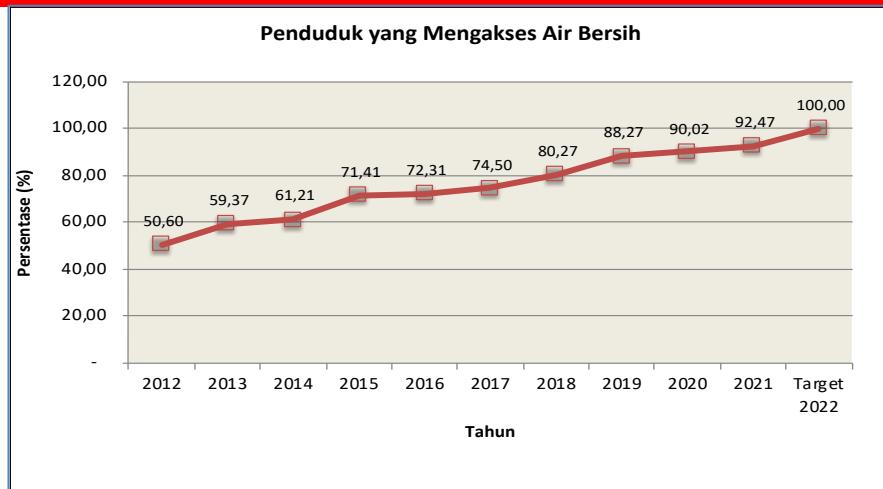
Akses air bersih merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus bisa didapatkan oleh masyarakat. Berikut capaian akses air bersih yang bisa didapatkan penduduk Kab. Hulu Sungai Utara.

Tabel 3.13.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 11

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Penduduk yang mengakses Air bersih	%	100,00	96,81	92,47	95,52	92,47

Pencapaian target indikator kinerja air bersih hampir mencapai target yang ditetapkan tahun 2020, sehingga dinilai berhasil karena hampir mencapai 100% dan optimis dapat mencapai target akhir periode RPJMD tahun 2022 karena pada tahun keempat sudah sudah lebih dari 95%. Air bersih diakses masyarakat melalui pelayanan PDAM dan Non PDAM yang biasanya adalah Program PAMSIMAS. Wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 11 (sebelas) unit bangunan IPAM yang tersebar di setiap kecamatan, sedangkan program Pamsimas biasanya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang tidak dapat dilayani oleh PDAM.

Target yang direncanakan untuk cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan akan air bersih. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu persiapan yang sangat matang sehingga kedepan mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan lelang, dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Jika semua proses ini dapat terkendali dengan baik maka akan menghasilkan kinerja sesuai indikator kinerja yang ditetapkan. Adapun persentase capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum secara time series, baik yang berasal dari layanan PDAM maupun Non PDAM terlihat pada gambar berikut. Setiap tahun terlihat mengalami kenaikan.



Gambar 3.13. Penduduk yang mengakses air bersih di Kab. HSU

Berdasarkan gambar di atas terlihat peningkatan capaian dari tahun ke tahun dan diharapkan pada tahun 2022 (akhir RPJMD) seluruh masyarakat Kab. HSU sudah dapat mengakses air bersih baik melalui layanan PDAM maupun non PDAM. Berbagai upaya dilakukan baik dengan dana APBD maupun DAK dan sumber dana lainnya dari APBN.

I. Penduduk yang Mempunyai Sanitasi Layak

Peningkatan layanan terhadap akses sanitasi sudah menjadi prioritas nasional bahkan merupakan universal akses (SDG'S) dengan target akses sanitasi 100% pada tahun 2019. Secara target, Kabupaten Hulu Sungai Utara turut menargetkan 100% seperti halnya yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut capaian target penggunaan sanitasi layak di Kab. Hulu Sungai Utara

Tabel 3.14.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 12

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Penduduk yang mempunyai sanitasi layak	%	100,00	93,91	91,84	97,80	91,84

Dari tabel terlihat bahwa target tahun 2021 hampir tercapai 100% sehingga dinilai berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh adanya peran program dana desa yang besar dalam melaksanakan kegiatan sanitasi di perdesaan. Selain itu juga didukung oleh dana APBN yang disalurkan melalui dana DAK Fisik bidang sanitasi. Hal-hal tersebut ikut berkontribusi untuk pencapaian target sanitasi layak bagi penduduk Kab. Hulu Sungai Utara dengan pendanaan di luar APBD Kab. HSU yang memang sangat

terbatas. Sosialisasi pemahaman tentang koordinasi, kerjasama, sharing cost tentang pembangunan desa dengan aparat pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sehingga kedepan akan lebih dimantapkan.

Jika melihat capaian hingga tahun 2021 ini, maka optimis target 100% penduduk memiliki sanitasi layak pada tahun 2022 akan tercapai, sepanjang alokasi anggaran masih cukup signifikan dan ditambah dengan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya sanitasi layak dalam menjalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berikut capaian indikator ini secara time series.



Gambar 3.14. Penduduk yang mempunyai sanitasi layak di Kab. HSU

Dari tabel di atas terlihat kenaikan yang sangat signifikan (lebih dari 50%) jika dilihat dari tahun 2012 hingga 2020. Dari tahun 2012 ke 2013 kenaikan cukup tajam, selanjutnya kenaikan cukup landai hingga tahun 2017. Tahun 2018 dan 2019 kenaikan cukup tinggi, sedangkan 2020 dan 2021 kenaikan melandai mendekati target RPJMD. Hal ini didukung oleh adanya Dana Desa dan alokasi yang cukup banyak dari Dana DAK, karena untuk mendukung target nasional yang menargetkan 100% penduduk memiliki sanitasi layak.

m. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas air merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pencemaran dan merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas lingkungan hidup. Berikut capaian realisasi nilai Indeks Kualitas Air tahun 2021.

Tabel 3.15.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 13

No.	IKU	Satuan	Target	Tahun 2021	Capaian
-----	-----	--------	--------	------------	---------

			Akhir RPJMD (2022)	Target	Realisasi	Capaian (%)	terhadap target akhir RPJMD (%)
1	Indeks Kualitas Air		45.00	45.00	55.00	122.22	122.22

Untuk Indeks Kualitas Air capaiannya lebih dari 100% atau dinilai sangat berhasil. Ini artinya terjadi perubahan kualitas air kearah yang lebih baik, meskipun nilai ini masih masuk dalam kategori cemar sedang baik target maupun realisasinya. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi pantau yaitu pada Sungai Balangan, Sungai Haur Gading dan Sungai Nagara dengan 7 (tujuh) parameter diantaranya DO, TTS, Total Posphat, BOD, COD, E Coli, Total Coliform. Indeks Kualitas Air ini memang agak sulit untuk ditingkatkan menjadi lebih bagus karena secara geografis Kab. Hulu Sungai Utara berada di daerah hilir yang merupakan tumpukan seluruh air yang berasal dari dua kabupaten yaitu Kab. Tabalong dan Kab. Balangan. Akibatnya pencemaran di daerah hulu berdampak pada daerah hilir yang merupakan wilayah Kab. HSU, sehingga sulit untuk dikendalikan.

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melaksanakan kerjasama pengelolaan wilayah sungai antar kabupaten dan pengawasan aktivitas masyarakat yang berpotensi meningkatkan pencemaran terhadap badan air diantaranya aktivitas MCK.

3.2.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan Visi Misi RPJMD di akhir periode. Untuk melihat capaian sasaran pembangunan pada tahun 2021 akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasarnya berdasarkan Misi adalah sebagai berikut :

MISI 1	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif
---------------	--

Untuk mewujudkan Misi I ini dirumuskan dengan dua tujuan yang berupakan goal di akhir periode dan empat sasaran dengan target kineja yang harus dicapai setiap tahunnya. Berikut capaian per sasaran pada Misi I:

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

Sasaran yang pertama pada misi I ini memiliki tiga indikator seperti ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai SAKIP Kabupaten		BB	B	B	100	
2	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	100.00	100.00
3	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	3	3	100.00	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja						100.00	100.00

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik (Good Governance). Beberapa indikator yang menjadi target untuk mewujudkan hal tersebut adalah nilai SAKIP, Opini BPK, dan Tingkat kematangan SPIP.

Dilihat dari hasil tabel di atas, realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 menunjukkan hasil dengan kategori berhasil sebagaimana target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Opini audit eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2021. Nilai ini telah didapatkan sejak tahun 2016.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dilaksanakan oleh seluruh SKPD tanpa kecuali, dari penetapan IKU, Kinerja hingga pelaporannya, namun belum semuanya masuk kategori yang akuntabel. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tolok ukur secara keseluruhan untuk menilai keberhasilan penerapannya. Pada tahun 2021 ditargetkan Nilai AKIP Kab. HSU minimal 60.00 (kategori B), dan berhasil tercapai dengan nilai 65,32. Ke depannya nilai ini diharapkan terus meningkat, sehingga target BB di akhir periode RPJMD bisa tercapai.

Tingkat kematangan SPIP merupakan penilaian terhadap maturitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. HSU tahun 2021 yang dilakukan oleh BPKP pada bulan Agustus 2018. SKPD telah memenuhi unsur SPIP dan SPI (Sistem Pengendalian Intern) dengan hasil penilaian akhir 3,06 atau sudah berada pada level 3 penuh. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator tingkat

kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan nilai 3 telah tercapai 100% sejak tahun 2018 yang artinya juga telah mencapai target RPJMD. Namun ke depannya nilai ini akan tetap diupayakan untuk terus meningkat sehingga lebih dari 3,06.

Beberapa faktor pendukung tercapainya target tingkat kematangan SPIP adalah sebagai berikut :

- Adanya keselarasan antara dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, dan Renja serta indikator kinerja SKPD;
- Tersedianya sarana, prasarana dan alokasi anggaran;
- Kualitas APIP yang cukup memadai;
- Tingginya kesadaran obrik terhadap penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan publik yang prima

Tabel 3.17.
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pelayanan publik yang prima

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80.00	79.50	78.94	99.30	98.68
Rata-rata Capaian Kinerja						99.30	98.68

Keberhasilan capaian pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari tabel di atas terlihat bahwa target Nilai IKM pada unit pelayanan publik sebesar 79.50 dan berhasil dicapai 78.94. Ini menunjukkan kondisi yang berhasil dan optimis dapat mencapai target akhir RPJMD. Penilaian IKM ini dilakukan terhadap pelayanan umum yaitu pada 10 (sepuluh) Kantor Kecamatan, 1 (satu) Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Rumah Sakit dan puskesmas-puskesmas. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah harus terus ditingkatkan, sehingga diharapkan masyarakat terpenuhi segala haknya. Untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Unit penyelenggaraan pelayanan publik juga sudah harus menerapkan Standar Pelayanan Publik.

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas fiskal/pembentukan daerah

Tabel 3.18.
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kapasitas fiskal/pembangunan daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pertumbuhan PAD	%	22.15	18.88	29.44	155.93	132.91
Rata-rata Capaian Kinerja						155.93	132.91

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD. Nilai PAD Kab. HSU pada tahun 2020 sebesar Rp. 123.541.201.164,04 Nilai ini diharapkan terus meningkat. Adapun pada tahun 2016, nilai PAD hanya Rp. 95.440.231.946,-. Pada tahun 2021 pertumbuhannya diharapkan 18.88% dan telah tercapai melampaui itu sehingga dinilai sangat berhasil. Demikian pula untuk target tahun 2022, capaianya telah melampaui target RPJMD. Meskipun demikian masih perlu terobosan-terobosan baru dalam upaya peningkatan PAD untuk masa yang akan datang, baik dengan melalui pajak maupun retribusi daerah.



Untuk mewujudkan Misi II ini dirumuskan dengan tiga tujuan yang berupakan goal di akhir periode dan tujuh sasaran dengan target kineja yang harus dicapai setiap tahunnya. Berikut capaian per sasaran pada Misi II :

Sasaran 4 : Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan

Tabel 3.19.
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	100	98,86	98,86	98,86
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	85,3	83,12	75,47	90,80	88,48
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	100	100	99,20	99,20	99,20
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	100	98,14	93,29	95,06	93,29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

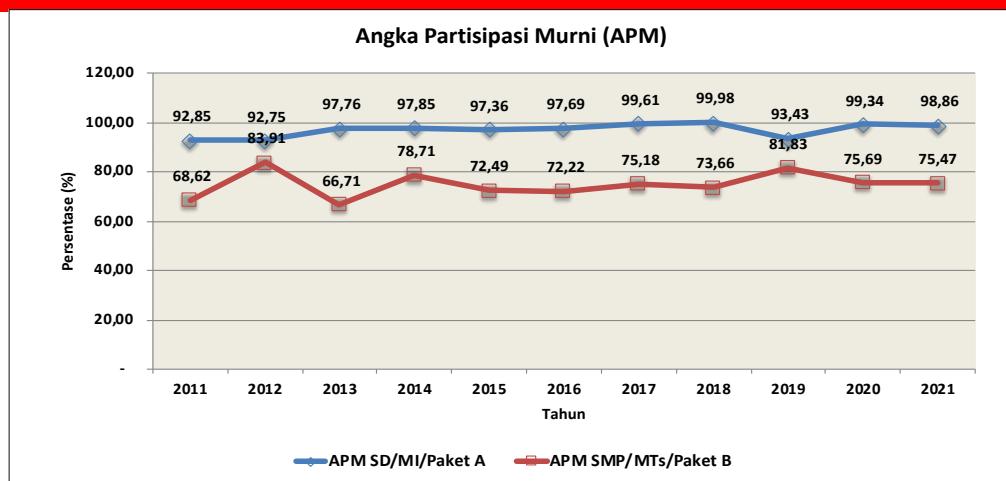
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	100	105,40	105,40	105,40
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	99,42	97,73	82,10	84,01	82,58
7	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100,00	100,00	100,00
8	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja						96,87	95,98

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilihat dari delapan indikator seperti pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2021 adalah 96,87% atau bisa dikategorikan berhasil dengan satu target kinerja lebih dari 100%, seperti terlihat pada tabel di atas. Secara keseluruhan semuanya masuk dalam kategori berhasil dan sangat berhasil.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A hampir 100%, ini artinya hampir seluruh masyarakat yang berusia SD/MI/Paket A telah sekolah sesuai usianya, kekurangan yang 1,14% kemungkinan karena adanya anak yang sekolah sebelum usia sekolah yang seharusnya. Ini terlihat dari APK yang lebih dari 100%, yang artinya jumlah anak yang sekolah SD/MI/Paket A melebihi jumlah anak yang seharusnya sekolah pada usia SD/MI/Paket A. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, sekolah-sekolah SD/MI/Paket A diwajibkan untuk hanya menerima anak jika usianya telah sesuai dengan usia seharusnya sekolah.

Untuk APM SMP/MTs/Paket B yang masih di bawah 80% karena masih adanya anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP sederajat dan adanya anak yang sekolah tidak sesuai usia sekolah yang seharusnya. Masih cukup rendahnya APM SMP/sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, jarak rumah dengan sekolah yang cukup jauh serta adanya faktor kemiskinan. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dengan memberikan perlengkapan sekolah dan alat transportasi sepeda kepada anak kurang mampu atau miskin, sehingga anak tersebut masih bisa bersekolah. Berikut perkembangan capaian APM di Kab. Hulu Sungai Utara.



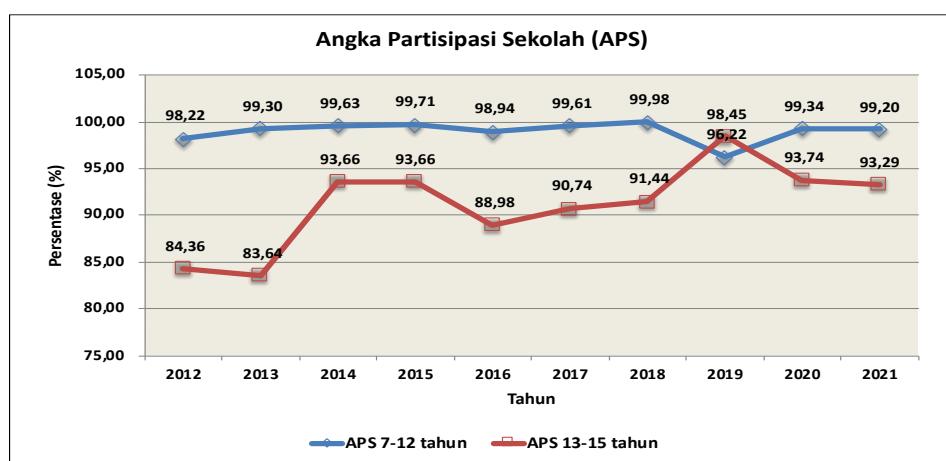
Gambar 3.15. Angka Partisipasi Murni di Kab. HSU

APM SD sederajat dari 2013-2018 terus meningkat meski tidak terlalu signifikan karena angkanya yang memang sudah mendekati 100%, namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019. Keadaan ini kemungkinan besar adalah karena bertambah banyaknya anak yang sekolah sebelum usia sekolah yang seharusnya. Ini terlihat dari APK yang lebih dari 100%, yang artinya jumlah anak yang sekolah SD/MI/Paket A melebihi jumlah anak yang seharusnya sekolah pada usia SD/MI/Paket A. Namun APM SD sederajat kembali mendekati 100% pada tahun 2020 dan sedikit menurun tahun 2021. Sedangkan APM SMP/MTs/Paket B sempat mengalami kenaikan drastis pada tahun 2014 , namun menurun pada 2015 dan menaik kembali perlahan hingga 2020 dan 2021. Tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ini artinya upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikannya secara umum mengalami perbaikan.

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama. Capaian APS 7-12 tahun pada tahun 2019 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 hampir 100%, artinya hampir tidak ada anak umur 7-12 tahun yang tidak sekolah, namun tahun 2019 menurun cukup drastis. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah terjadinya kesalahan data jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang diterima oleh Dinas Pendidikan selaku SKPD yang mengeluarkan nilai APS ini, dan yang kedua adalah banyaknya anak usia 7-12 tahun yang tercatat sebagai warga Kab. HSU namun bersekolah ke Kabupaten lain sehingga tidak tercatat dalam aplikasi DAPODIK Dinas Pendidikan maupun

aplikasi EMIS dari Kemenag. Namun pada tahun 2020 APS 7-12 tahun kembali mendekati angka 100%. Ini berarti ada koreksi data kependudukan setelah dilakukannya sensus penduduk pada tahun 2020, sehingga nilai data ini dengang lebih valid dibandingkan data tahun 2019. Pada tahun 2021 nilainya sagnant hamper sama dengan tahun 2020.

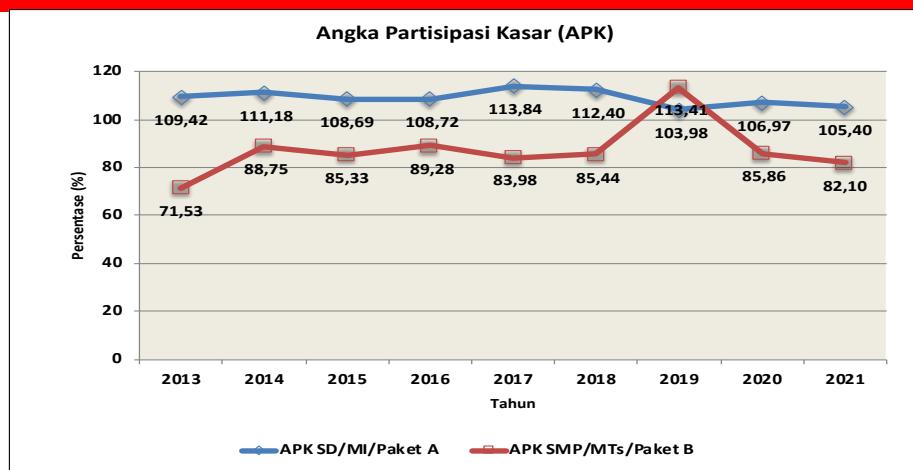
Capaian APS 13-15 tahun pada tahun 2019 telah lebih dari 98%, ini artinya kurang dari 2% anak usia ini yang tidak bersekolah. Capaian ini hampir mencapai target RPJMD. Namun data ini kembali terkoreksi pada tahun 2020 sehingga APS 13-15 tahun menurun sekitar 5%. Berikut perkembangan APS 7-12 tahun dan APS 13-15 tahun.



Gambar 3.16. Angka Partisipasi Sekolah di Kab. HSU

Selama periode 2012 sampai dengan 2016, APS 7-12 cenderung sama, sedangkan APS 13-15 terjadi fluktuasi, jika dilihat secara keseluruhan kecenderungannya terus meningkat. Hal ini sejalan dengan kesadaran untuk sekolah yang semakin tinggi dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan maupun dinas lain yang terkait.

Indikator selanjutnya untuk melihat kualitas pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 105,40% dan SMP/MTs sebesar 82,10%. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Adapun perkembangan APK dari tahun ke tahun seperti grafik berikut.



Gambar 3.17. Angka Partisipasi Kasar di Kab. HSU

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI selama tahun 2013-2021 sedikit fluktuatif, dan angka ini diharapkan dapat mendekati angka 100%, yang artinya mulai tumbuh kesadaran untuk bersekolah sesuai dengan usianya. Angka partisipasi Kasar tingkat SLTP dari tahun ke tahun berfluktuatif dan menaik tajam pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali terkoreksi mendekati angka-angka seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan karena adanya koreksi data kependudukan setelah dilakukannya sensus penduduk pada tahun 2020, sehingga nilai data ini denggap lebih valid dibandingkan data tahun 2019. Perbaikan nilai APK ini diharapkan akan tercapai pada tahun-tahun berikutnya dengan meningkatnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anaknya sesuai jenjang usianya.

Adapun untuk angka kelulusan siswa SD/MI maupun SMP/MTs dalam beberapa tahun terakhir telah tercapai 100%. Artinya pembelajaran telah sesuai dengan bobot dan kualitas minimal yang disyaratkan untuk sebuah kelulusan sesuai jenjangnya.

Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.20.
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	jumlah Kematian Ibu (orang)	Orang	1	2	12	-400,00	-1000,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB)		16	17	15,70	107,65	101,88
3	Prevalensi gizi buruk		4	5	9,53	9,40	-38,25
Rata-rata Capaian Kinerja						- 94.32	- 312.13

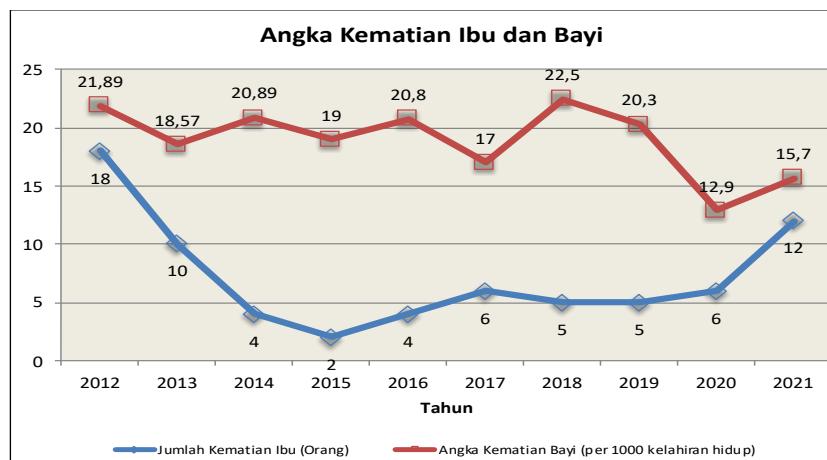
Beberapa indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah seperti yang tertera pada tabel di atas. Capaian untuk indikator kesehatan ini bisa dikatakan kurang berhasil karena masih jauh dari target yang direncanakan, kecuali untuk Angka Kematian Bayi. Terlihat rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini minus, apalagi untuk capaian RPJMD nya juga minus yang artinya terjadi perlambatan yang cukup signifikan. Untuk itu perlu terobosan program/kegiatan yang nyata untuk meningkatkan capaian kinerja ini dari berbagai sektor terkait.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang biasa digunakan secara nasional, namun dikarenakan angka kematian ibu itu pembaginya adalah 100.000 kelahiran hidup (KH) maka dalam hal ini di Kab. HSU digunakan jumlah absolut saja karena di Kab. HSU jumlah kelahiran hidupnya hanya berkisar 3.000 - 4.000 saja. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 12 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 6 orang. Jumlah kematian ibu yang ditargetkan 2, dan realisasinya 12, kalau dilihat secara riil memang tidak banyak, namun jika diperhitungkan capaiannya menjadi kurang berhasil karena 0%.

Tingginya kasus kematian ibu ini salah satunya disebabkan karena kondisi pandemi covid 19, dimana dari jumlah tersebut sepertiganya disebabkan karena positif covid 19. Diharapkan tahun-tahun mendatang setelah pandemi berakhir kasus ini akan berkurang. Beberapa terobosan yang telah dilakukan pada program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi adalah optimalisasi Kelas Ibu Hamil, kunjungan dokter spesialis kebidanan dan kandungan ke Puskesmas dalam mendeteksi ibu hamil resiko tinggi, pelayanan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas bidan serta optimalisasi rujukan ke puskesmas poned dan Rumah Sakit Ponek pada ibu hamil dan bersalin resiko tinggi dan tetap menjalin kerjasama kemitraan dengan dukun kampung.

Pada Angka Kematian Bayi terlihat capaian yang lebih dari 100%. Angka kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 15,70 dari target 17,00, naik sedikit dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 12,90. Penyebab kematian bayi juga masih didominasi oleh Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia. Hal ini selain dipengaruhi oleh keterampilan dan kompetensi nakes dalam memberikan pelayanan juga terkait dengan sarana prasarana yang tersedia, status kesehatan ibu dan bayi terutama status gizi dan penyakit penyerta. Terobosan yang telah diilakukan adalah mengupayakan semua persalinan di fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas Kunjungan Neonatas

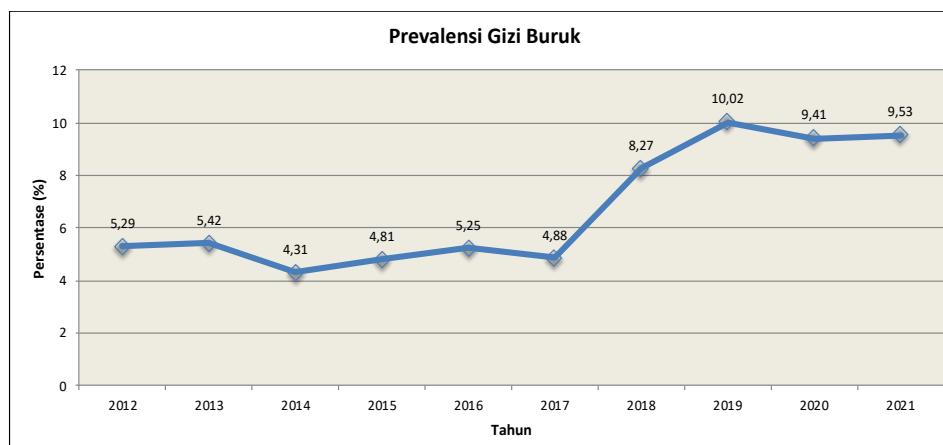
(KN), peningkatan kapasitas nakes dengan pelatihan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Sakit (MTBM, MTBS) serta pendidikan perawatan bayi melalui kelas Ibu Hamil. Berikut perkembangan angka kematian ibu dan bayi di Kab. HSU.



Gambar 3.18. Angka Kematian Ibu dan Bayi Kab. HSU

Secara umum terlihat fluktuatif, berbagai penyebabnya pun sangat bervariasi seperti penjelasan di atas. Angka-angka ini perlu terus diturunkan untuk tahun-tahun mendatang agar target tahun 2022 dapat tercapai.

Untuk prevalensi gizi buruk juga terlihat realisasi yang masih cukup jauh dari target. Prevalensi gizi buruk adalah gabungan dari balita kurus dan sangat kurus. Pada tahun 2021 prevalensi kasus gizi buruk adalah 9.53% dari target 5,00%. Prevalensi Kasus Gizi Buruk pada tahun 2020 adalah 9,41% dari target 5.10%. Dari data tersebut terjadi sedikit kenaikan prevalensi gizi buruk pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi gizi anak di Kab. HSU masih belum membaik, yang mana akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, perlu upaya keras untuk menurunkan indikator ini dengan melibatkan lintas sektor terkait. Berikut perkembangan gizi buruk di Kab. HSU.



Gambar 3.19. Prevalensi Gizi Buruk di Kab. HSU

Jika dilihat perkembangan gizi buruk pada gambar di atas, maka tahun

2019 merupakan nilai gizi buruk paling tinggi dalam satu dasawarsa terakhir dan terlihat peningkatan yang sangat drastis. Namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020 dan 2021 ini meskipun masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dan perlu dicari tahu penyebab pastinya kenapa bisa terjadi. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah pola asuh yang belum benar terutama untuk pemberian makanan balita karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang makanan bergizi yang sehat dan seimbang serta ketersediaan makanan bergizi yang belum memadai pada sebuah keluarga. Selain itu juga masih tingginya angka perkawinan pada usia muda yang mengakibatkan masih belum matang dan mapannya orang tua sehingga anak-anak yang dilahirkan pun tidak terurus sebagaimana mestinya.

Sasaran 6 : Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tabel 3.21.

Analisis Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif	%	31.05	26,48	54,34	205,21	175.01
Rata-rata Capaian Kinerja					160.40	113.24	

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dari 219 LPM yang ada, tercatat 119 LPM yang aktif (54,34%). Capaian ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 35.16% dan tahun 2019 sebesar 17.80%. Hal ini disebabkan karena tahapan sosialisasi pembentukan LPM di desa-desa baru dimulai tahun 2018, sehingga keaktifannya pun masih rendah pada tahun 2019 dan tahun 2020 LPM sudah banyak terbentuk dan yang ada tinggal pembinaan. Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri. Realisasi capaian indikator ini dinilai cukup berhasil, namun perlu upaya-upaya lebih di tahun mendatang untuk mengoptimalkan peran LPM di masyarakat.

Sasaran 7 : Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak

Tabel 3.22.
Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pemberdayaan Gender		64.89	64,84	70,65	108,96	108,88
2	Rasio KDRT		0.011	0,012	0,011	108,33	100,00
3	Tingkat Capaian Status Kabupaten Layak Anak		900	800	632,50	79,06	70,28
Rata-rata Capaian Kinerja						98.79	93.05

Capaian indikator pada sasaran ini bervariasi, ada indikator yang sangat berhasil dan ada juga indikator yang kurang berhasil. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender terlihat hasil yang telah melebihi target 2021 bahkan target RPJMD. Masalah gender di Kab. HSU lumayan bagus kondisinya, artinya tidak ada masalah atau kasus terkait dengan gender. Untuk Rasio KDRT capaiannya juga sangat berhasil karena penurunannya sudah melebihi target. Namun sosialisasi dan edukasi tentang keluarga dan KDRT serta advokasi hukum kepada masyarakat tetap diperlukan agar kasus KDRT dapat lebih ditekan. Untuk Tingkat Capaian Status Kabupaten Layak Anak belum mencapai target tahun 2021 meskipun Kab. HSU telah mendapatkan penghargaan terkait Kota layak anak dan terus berbenah terutama dalam hal infrastruktur agar fasilitas publik bisa layak anak.

Sasaran 8 : Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

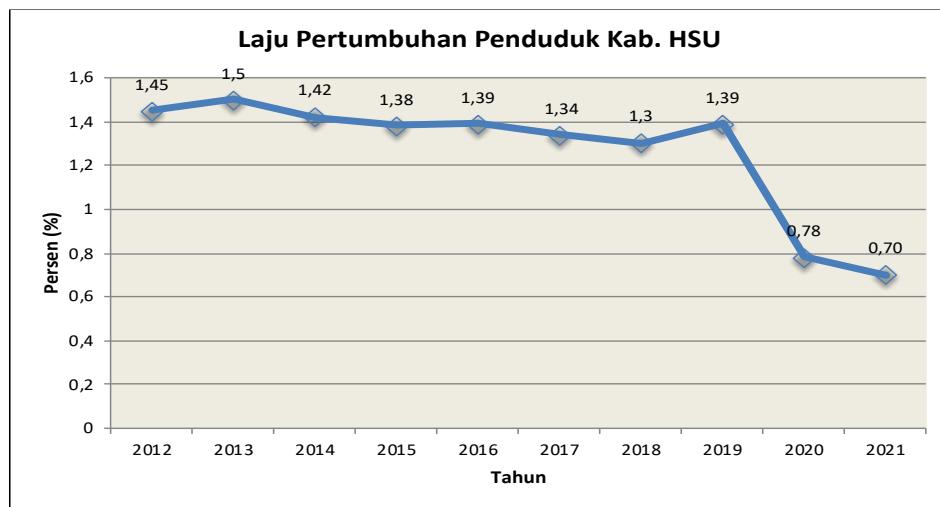
Tabel 3.23.
Analisis Pencapaian Sasaran 8
Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.29	1,3	0,70	146.15	145.74
Rata-rata Capaian Kinerja						146.15	145.74

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penduduk adalah semua orang yang telah berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Jumlah penduduk Kab. HSU pada tahun 2020 sebanyak 228.831 jiwa.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi, jika pada tahun 2013 jumlah penduduk mencapai 219.210 jiwa meningkat terus dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 menjadi 228.831 jiwa, atau terjadi penambahan penduduk sebanyak 9.621 jiwa. Jumlah penduduk 2020 menurun dibandingkan jumlah penduduk 2019, hal ini karena perhitungan jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk yang berakibat terkoreksinya data jumlah penduduk tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan pendekatan statistik. Pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk. Demikian juga untuk Laju Pertumbuhan penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun berfluktuatif namun tidak terlalu mencolok perubahannya dari 2012 hingga 2019. Adapun tahun 2020 dan 2021 pertumbuhannya di bawah 1%, sehingga sdh melebihi target pertumbuhan penduduk tahun 2021 bahkan target RPJMD tahun 2022. Berikut laju pertumbuhan penduduk Kab. HSU dalam satu dasawarsa terakhir.



Gambar 3.20. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kab. HSU

Selama delapan tahun terakhir (2012-2019) laju pertumbuhan penduduk Kab. HSU cenderung stabil, dimana laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya kurang dari sama dengan 1,50% seperti pada grafik di atas. Namun pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan yang sangat kecil dibawah 1% karena perhitungan jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk yang berakibat terkoreksinya data jumlah penduduk tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan pendekatan statistik. Demikian juga untuk tahun 2021. Di Provinsi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kalimantan Selatan jumlah penduduk Kab. HSU menduduki peringkat tiga terbawah setelah Kab. Balangan dan Kab. Tapin.

Sasaran 9 : Meningkatnya Prestasi Olahraga

Tabel 3.24.

Analisis Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya Prestasi olahraga

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan medali di kejuaran provinsi	cabang	25	22	13	59.09	52.00
Rata-rata Capaian Kinerja						59.09	52.00

Olahraga merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Prestasi olahraga diharapkan terus meningkat pada berbagai cabang yang ada. Pada tahun 2021 dari target 22 cabang olahraga yang berprestasi tercapai 13 cabang olahraga (59,09%). Capaian ini dianggap kurang berhasil. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi covid-19 selama tahun 2020 hingga 2021, sehingga tidak banyak kejuaran atau event olahraga yang dilaksanakan. Namun pembinaan tetap dilaksanakan melalui program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga dengan melakukan kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dengan cara melaksanakan seleksi olahraga bagi pelajar baik tingkat SLTP dan SLTA di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui kegiatan LPI dan Kompetisi lainnya. Selain itu juga adanya dukungan dari stakeholder terkait seperti KONI maupun club-club olahraga yang ada.

Sasaran 10 : Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis

Tabel 3.25.

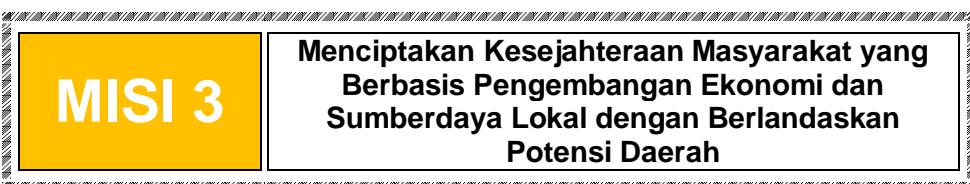
Analisis Pencapaian Sasaran 10

Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah Kejadian berlatar belakang konflik SARA		0	0	0	100.00	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja						100.00	100.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Jumlah kejadian berlatar belakang SARA di Kab. HSU tidak terjadi pada tahun 2020, sehingga target yang ditetapkan berhasil yaitu 100%. Hal ini tidak terjadi karena mayoritas penduduk Kab. HSU beragama Islam. Adanya penduduk yang beragama lain biasanya hanya pendatang yang karena alasan pekerjaan atau hal lainnya menjadi warga Kab. HSU. Berdasarkan rentang waktu juga tidak pernah terjadi adanya konflik berlatar belakang SARA di Kab. HSU, karena pada dasarnya masyarakat di Kab. HSU itu sangat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.



Untuk mewujudkan Misi III ini dirumuskan dengan satu tujuan yang berupakan goal di akhir periode dan enam sasaran dengan target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Berikut capaian per sasaran :

Sasaran 11 : Meningkatnya hasil dan produksi pertanian dan Peternakan serta Perikanan

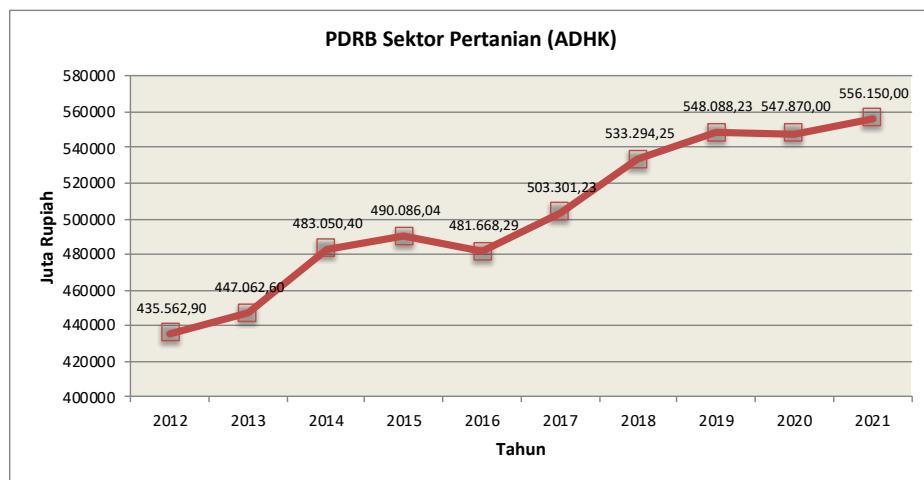
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas wilayah 892,70 km² didominasi oleh lahan rawa lebak, dimana kurang lebih 89% merupakan daerah agraris dengan sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting di dalam perekonomiannya, baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu potensi yang sangat besar ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal, dimana dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Untuk itu sasaran ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dinilai dengan indikator Nilai PDRB sektor pertanian.

Tabel 3.26.
Analisis Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya hasil dan produksi pertanian dan Peternakan serta Perikanan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	Rp	533,143.13	524.794,34	556.150,00	105,97	104.32
Rata-rata Capaian Kinerja					105,97	104.32	

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam indikator ini yang dilihat adalah PDRB menurut lapangan usaha yaitu pertanian dan berdasarkan harga konstan.

Nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dengan capaian sangat berhasil. PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara kontribusi terbesarnya adalah dari pertanian, yang dalam hal ini termasuk peternakan, perikanan, dan kehutanan. Namun dari kehutanan kontribusinya sangat kecil karena di Kab. HSU tidak ada hutan yang memproduksi kayu atau yang lainnya. Kenaikan nilai PDRB ini disumbang oleh kenaikan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Ketiganya ini merupakan bidang yang menjadi mata pencaharian dan penghidupan masyarakat Kab. HSU, sehingga wajar jika penyumbang angka PDRB paling tinggi. Perhatian pemerintah daerah terhadap bidang-bidang ini pun cukup tinggi, hal ini bisa dilihat pada alokasi anggaran pada program dan kegiatan di SKPD-SKPD teknis yang mengurusinya. Untuk pertanian komoditi yang diperhitungkan produksinya adalah padi, adapun peternakan yang dominan diusahakan adalah Itik alabio dan Kerbau, sementara untuk perikanan ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Secara time series nilai PDRB sektor pertanian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.21. PDRB Sektor Pertanian Kab. HSU

Dari gambar terlihat PDRB sektor pertanian trennya terus meningkat, meskipun pada tahun 2016 ada sedikit penurunan. Hal ini disebabkan produksi perikanan yang menurun cukup signifikan, yaitu perikanan budidaya. Sedangkan produksi pertanian naik, demikian pula peternakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produksi perikanan budidaya ini adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya pembudidaya yang menghentikan kegiatan budidayanya akibat harga pakan yang berfluktuatif mengakibatkan tingginya biaya produksi jika dibandingkan dengan harga jual yang rendah sehingga petani menjadi rugi;
2. Kualitas air yang cenderung mengalami penurunan sehingga mengakibakan tingginya mortalitas pada saat proses budidaya;
3. Komoditas yang biasanya tahan terhadap kondisi perairan tahun-tahun terakhir juga mengalami kematian sehingga banyak pembudidaya tidak melakukan aktivitas budidaya;
4. Komoditas local yang tahan terhadap kondisi perairan tahun-tahun terakhir ini juga mengalami kendala karena ketersediaan pakan yang tidak tercukupi di perairan (pakan ruwah);
5. Jumlah produksi benih BBI yang dianggap dapat mudah beradaptasi dengan lingkungan belum dapat memenuhi kebutuhan benih pada pembudidaya ikan di Kab. Hulu Sungai Utara.

Untuk meningkatkan produksi kembali Dinas Perikanan mengupayakan beberapa hal berikut :

1. Menggiatkan program pakan mandiri, yaitu pemenuhan pakan dengan cara memproduksi pakan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan pembuat pakan yang banyak ditemui dan mudah didapat oleh petani;
2. Mencarikan akses pasar yang berkesinambungan dengan cara mengatur pola tanam, jenis ikan yang dipelihara, memberikan informasi pasar, menyelenggarakan perbenihan serta pengkajian penebaran komoditas lain selain patin di kolam;
3. Khusus untuk pengembangan ikan lokal dilaksanakan melalui memperbanyak kegiatan demcara baik aspek perbenihan maupun pembesaran, meningkatkan keterampilan/keahlian petugas dan pembudidaya melalui pelatihan, magang dan studi banding;
4. Peningkatan SDM, fasilitas dan operasional Balai Benih Ikan Lokal agar kedepan dapat meningkatkan jumlah benih yang dihasilkan;

5. Mencari teknologi sistem pengairan untuk kolam-kolam rawa yang hanya memanfaatkan air hujan.

Produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang merupakan sasaran prioritas dari Dinas Pertanian memiliki kontribusi yang sangat nyata terhadap PDRB. Untuk produksi tanaman pangan indikator yang dijadikan target capaian kinerja adalah produksi padi, jagung dan kacang tanah. Pada tahun 2020 produksi padi dan kacang tanah tidak mencapai target, sedangkan produksi jagung melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Dinas Pertanian. Produksi padi sebesar 103.749 ton, produksi jagung sebesar 1.250 ton, dan produksi kacang tanah sebesar 328 ton. Keberhasilan/kegagalan capaian produksi ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan produksi tanaman pangan adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian produksi tanaman padi hanya tercapai 75,70% (target 137.052 ton, realisasi sebanyak 103.749 ton), hal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
 - Luas tanam padi yang hanya 77.34% dari target 25.750 Ha, dan luas panennya hanya 76.60% dari target 24.978 Ha.
 - Curah hujan tinggi yang merata sepanjang tahun sehingga kondisi lahan sawah banyak tergenang air yang menyebabkan petani tidak dapat secara maksimal melakukan penanaman padi
 - Perkembangan tanaman padi tidak maksimal dimana sebagian tanaman mulai terendam dan juga adanya serangan hama tikus yang menyerang tanaman padi sehingga produktivitas padi tidak maksimal.
 - Adanya pemotongan anggaran sebesar 50% yang berimbas pada pengurangan sarana produksi dan prasarana pertanian yang disalurkan kepada petani
2. Pencapaian produksi jagung melebihi target yang ditetapkan yaitu 223.21% (target 560 ton, realisasi sebanyak 1250 ton), hal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
 - Meningkatnya luas tanam jagung dan produktivitasnya
 - Meningkatnya bantuan sarana produksi tanaman jagung yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
 - Meningkatnya pemahaman para petani dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada untuk melakukan penanaman jagung

3. Pencapaian produksi tanaman padi hanya tercapai 65.47% (target 501 ton, realisasi sebanyak 328 ton), hal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- Luas tanam kacang tanah yang hanya 54.76% dari target 420 Ha, dan luas panennya hanya 55.53% dari target 226 Ha.
- Curah hujan tinggi yang merata sepanjang tahun sehingga kondisi lahan banyak tergenang air yang menyebabkan petani tidak dapat secara maksimal melakukan penanaman kacang tanah
- Adanya pemotongan anggaran sebesar 50% yang berimbas pada pengurangan sarana produksi pertanian yang disalurkan kepada petani.

Untuk produksi peternakan indikator yang dijadikan target capaian kinerja adalah produksi daging ternak besar, daging ternak unggas, dan telur unggas. Pada tahun 2020 daging ternak besar produksinya 338.534 kg, daging ternak unggas produksinya 2.184.552 kg, dan telur unggas produksinya 6.719.807 kg. Semua produksi tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. Hal ini disebabkan oleh :

1. Rendahnya permintaan masyarakat terhadap daging dan telur karena adanya pembatasan kegiatan di masyarakat akibat kondisi pandemic covid 19 yang berimbas pada jumlah ternak yang dipotong dan jumlah populasinya;
2. Adanya pemotongan anggaran sebesar 50% yang berimbas pada pengurangan sarana produksi peternakan yang disalurkan kepada peternak.

Untuk produksi perkebunan yang dijadikan indikator hanya produksi karet dengan realisasi yang hampir mencapai target, yaitu 409.749 ton atau 97.84% dari target sebesar 418.816 ton. Sub sector perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memang tidak dominan karena hanya diusahakan di sebagian kecil wilayah yang lahannya sesuai. Meskipun demikian tetap dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok tani serta penyaluran sarana produksi.

Adapun hortikultura yang dikembangkan dan dinilai merupakan komoditi strategis sehingga dijadikan indikator adalah produksi cabe dan bawang merah. Produksi cabe yang ditargetkan 168 ton berhasil terealisasi 184 ton sehingga dinilai sangat berhasil (109.52%). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi cabe adalah :

1. Pencapaian produktivitas tanaman cabe sebesar 73.68 ku/ha, yang dilakukan melalui bantuan sarana produksi dan pengendalian OPT;
2. Tingginya harga cabe di pasaran sehingga mendorong petani lebih bergairah menanam cabe juga karena adanya kegiatan pengembangan kawasan cabe yang didanai dari APBN;
3. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok tani.

Adapun untuk bawang merah produksinya belum sesuai target yang ditetapkan yaitu hanya 3 ton dari target 16 ton (18.75%), hal ini dikarenakan produktivitasnya yang belum sesuai target (target 53 ku/ha, realisasi 30 ku/ha), serta luas tanam yang hanya seperempatnya dari target yang ditetapkan. Selain itu bawang merah hanya ditanam petani sebagai usaha sampingan saja, karena bawang merah merupakan komoditas yang baru beberapa tahun terakhir dikembangkan di Kab. HSU sehingga masih perlu penyesuaian dengan cara budidayanya maupun teknologinya.

Sasaran 12 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Tabel 3.27.

Analisis Pencapaian Sasaran 12
Meningkatkan ketahanan pangan daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Kkal/Kapita/Th):						
1	-Total Energi	kkal	3,633	3.633	2.491	68,57	68,57
2	-Total Protein	gr	88.43	87,43	60,74	69,47	68,69
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		83.00	82,00	82,30	100,37	99,16
Rata-rata Capaian Kinerja						79.47	78.80

Untuk sasaran ini ada tiga indikator yang ditargetkan dengan rata-rata capaian sebesar 79.47%. Dua indikator sasaran ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga sudah dibahas pada bagian Evaluasi IKU. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Ketersedian Energi dan protein perkapita berupa total energi dan total protein. Untuk capaian indikator PPH Konsumsi telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 82.30. Untuk target RPJMD pun sudah hampir tercapai 100%.

Untuk perhitungan PPH konsumsi ini dilakukan pengambilan data pada

27 (dua puluh tujuh) desa dengan karakter wilayah pertanian, perikanan dan wilayah lainnya di seluruh Kecamatan kecuali Kec. Paminggir. Setiap desa diambil 10 KK. Dari hasil perhitungan scor PPH dimana terdapat 9 kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain. Dari hasil survey tersebut sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi masyarakat masih berasal dari padi/nasi dibanding dengan sumber karbohidrat yang lainnya seperti umbi-umbian. Namun jika dilihat secara keseluruhan konsumsi masyarakat Kab. HSU sudah cukup beragam. Adapun perkembangan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.22. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kab. HSU

Sasaran 13 : Berkembangnya peran ekonomi kreatif Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Tabel 3.28.

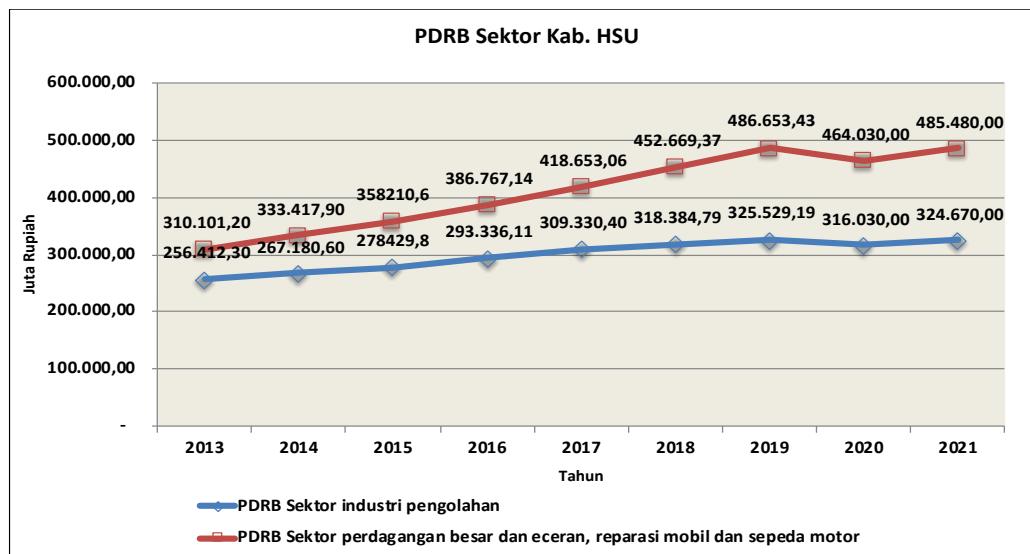
Analisis Pencapaian Sasaran 13

Berkembangnya peran ekonomi kreatif Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	PDRB Sektor industri pengolahan	Juta Rupiah	381,261.53	366.607,79	324.670,00	88,56	85,16
2	PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Juta Rupiah	539,065.27	513.694,04	485.480,00	94,51	90,06
Rata-rata Capaian Kinerja					91.53	87.61	

Untuk perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dihat dari PDRB Sektor industri pengolahan dan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor. Indikator PDRB Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dinilai berhasil meskipun belum mencapai 100%. Terhadap capaian target RPJMD pun optimis dapat tercapai jika melihat tren peningkatannya. Kegiatan UMKM merupakan aktifitas kedua terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga nilai PDRB sektor ini juga diharapkan terus berkembang. Berikut capaian sector ini dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 3.23. PDRB Sektor Pendukung UMKM Kab. HSU

Berdasarkan grafik di atas dari tahun 2013-2019 terlihat tren yang terus meningkat untuk nilai PDRB sektor pendukung UMKM di Kab. HSU, dan sedikit ada penurunan pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa geliat UMKM terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian wilayah di Kab. HSU, meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 karena dampak dari kondisi pandemi covid-19 yang melanda dunia.. Penurunan ini dinilai tidak terlalu signifikan, dimana dua sektor ini cukup bertahan ditengah kondisi ekonomi yang sedang memburuk.

Sasaran 14 : Meningkatnya Sektor Pariwisata

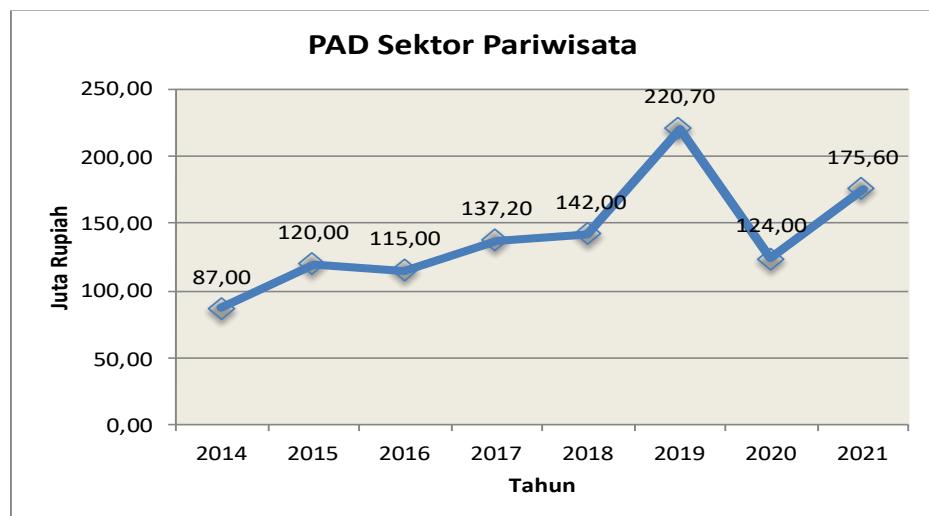
Tabel 3.29.

Analisis Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya sektor pariwisata

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	PAD sektor Pariwisata	Juta Rupiah	175.00	173,00	175,60	101,50	100.34
Rata-rata Capaian Kinerja						101,50	100.34

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sekarang menjadi primadona dimana-mana, seiring dengan gaya hidup masyarakat yang suka travelling dan memerlukan refresh. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan kenapa pariwisata menjadi salah satu prioritas yang perlu dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Banyak objek wisata unik yang bisa dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti kerbau rawa, susur sungai, pasar kerajinan, dan lain-lain. Keberhasilan pariwisata pada umumnya dilihat dari banyaknya kunjungan yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah jika tempat-tempat wisata bisa dikelola dengan baik. Pada tahun 2021 capaian PAD sektor pariwisata telah melampaui target 2021 bahkan target RPJMD dan dinilai sangat berhasil. Angka ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 124 juta rupiah. Pada masa sekarang PAD pariwisata ini hanya didapatkan pada objek wisata candi agung, padahal banyak potensi lain yang bisa ditarik retribusi dan bisa menambah PAD. Berikut capaian PAD pariwisata dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 3.24. PAD sektor pariwisata Kab. HSU

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2014-2019 PAD pariwisata cenderung meningkat dan pada tahun 2019 peningkatannya cukup

tajam. Ini menunjukkan bahwa wisatawan yang datang juga terus bertambah. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yang menunjukkan menurunnya wisatawan yang datang. Hal ini dikarenakan kebijakan Pemerintah yang memberlakukan pembatasan aktivitas publik di luar rumah untuk mengurangi penularan covid 19, seperti pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun pengecekan mobilitas orang yang keluar masuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun pada tahun 2021 menaik lagi seiring dengan menurunnya kasus covid 19 dan dibukanya fasilitas-fasilitas umum. Beberapa kendala pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih kurangnya sarana dan prasarana menuju ke dan di tempat lokasi wisata serta masih kurangnya informasi. Untuk itu perlu perhatian semua stakeholder terkait untuk bersama-sama membangun pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan lebih gencar lagi untuk promosi di berbagai media, terutama di media-media yang cepat sekali penyebarannya seperti Medsos (media sosial) di internet.

Sasaran 15 : Menurunnya Angka Pengangguran

Tabel 3.30.

**Analisis Pencapaian Sasaran 15
Menurunnya Angka Pengangguran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.1	2,10	4,8	- 28,57	- 28,57
Rata-rata Capaian Kinerja					- 28,57	- 28,57	

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius karena dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian dinilai kurang berhasil karena masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini bisa juga karena menetapkan target yang terlalu optimis, karena angka pengangguran mendekati nol itu agak mustahil di negara berkembang seperti Indonesia. Target yang jauh dari harapan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena kondisi perekonomian dan kebijakan tentang ketenagakerjaan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah pusat. Jika dilihat secara time series

tingkat pengangguran terbuka di Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut.



Gambar 3.25. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. HSU

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2011 – 2013 menunjukkan trend yang menurun, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2014 dan menurun kembali pada tahun 2015. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup signifikan (Untuk tahun 2016, BPS tidak mengeluarkan data ini) namun turun kembali pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini berarti program dan kegiatan yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang dulu dilaksanakan pemerintah daerah cukup efektif, namun peningkatan yang cukup tajam diduga terkait dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan ketenagakerjaan secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat cukup tinggi. Peningkatan ini karena kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan yang terdampak kondisi ini dan lesunya beberapa sektor perekonomian.

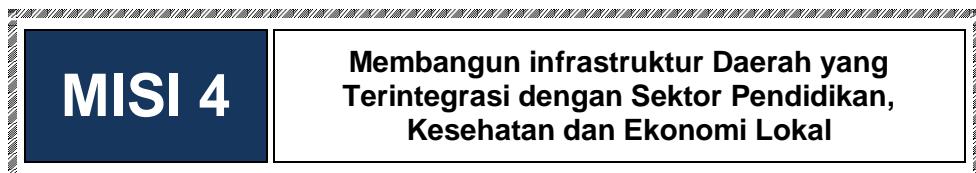
Sasaran 16 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel 3.31.
Analisis Pencapaian Sasaran 16
Menurunnya Angka Kemiskinan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase penduduk miskin	%	5.5	5.96	6.14	96.98	88.36
Rata-rata Capaian Kinerja						96.98	88.36

Indikator sasaran ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga sudah dibahas pada bagian 3.2.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).



Untuk mewujudkan Misi IV ini dirumuskan dengan satu tujuan yang berupakan goal di akhir periode dan tiga sasaran dengan target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Berikut capaian per sasaran :

Sasaran 17 : Meningkatnya Aksesibilitas/Konektivitas Wilayah

Tabel 3.32.
Analisis Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik	%	72.61	71,69	73,97	103,18	101,87
2	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	%	96.35	95,89	95,89	100,00	99,52
3	Persentase wilayah yang terhubung dengan jaringan komunikasi	%	65	60,00	67,00	111,67	103,08
Rata-rata Capaian Kinerja						104.95	101.49

Untuk melihat aksesibilitas/konektivitas wilayah ada tiga indikator yang dijadikan target seperti yang tertera di atas. Rata-rata capaian kinerjanya lebih dari 100% atau sangat berhasil. Untuk indikator pertama dan kedua karena juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga sudah dibahas pada bagian 3.2.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Persentase wilayah yang terhubung dengan jaringan komunikasi

sebesar 64% melebihi target yang ditetapkan. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 yang hanya 44% dan tahun 2019 sebesar 62%. Hal ini karena adanya spot-spot kosong yang telah bisa dijangkau oleh jaringan komunikasi terutama GMS dari vendor-vendor yang memperluas jaringan jangkauannya. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi kemungkinan besar adalah wilayah yang tidak berpenghuni serta tidak ada akses transportasi yang memadai.

Dalam bidang telekomunikasi ini telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom untuk sambungan jaringan telepon rumah atau kantor. Selain itu penggunaan telepon selular juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL (9), INDOSAT (3), TELKOM (2) , 3 (1), FLEXI (3), XL (5). Berikut perkembangan persentase wilayah yang terhubung dengan jaringan komunikasi.



Gambar 26. Persentase wilayah yang terhubung dengan jaringan komunikasi

Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi. Selain itu juga perlu dipertimbangkan untuk dipasang di daerah-daerah yang masih dalam kategori black spot (tidak ada sinyal).

Sasaran 18 : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Pengairan

Tabel 3.33.

Analisis Pencapaian Sasaran 18

Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Luas sawah yang dapat diairi irigasi	Ha	6,500	6,450	6,450	100.00	99.23
Rata-rata Capaian Kinerja				100.00		99.23	

Indikator sasaran ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga sudah dibahas pada bagian 3.2.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran 19 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Permukiman

Untuk melihat pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman ada tiga indikator yang dijadikan target seperti yang tertera di bawah. Rata-rata capaian kinerjanya lebih dari 100% atau sangat berhasil, dan optimis bisa tercapai di akhir periode RPJMD. Untuk indikator pertama dan ketiga karena juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga sudah dibahas pada bagian 3.2.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.34.

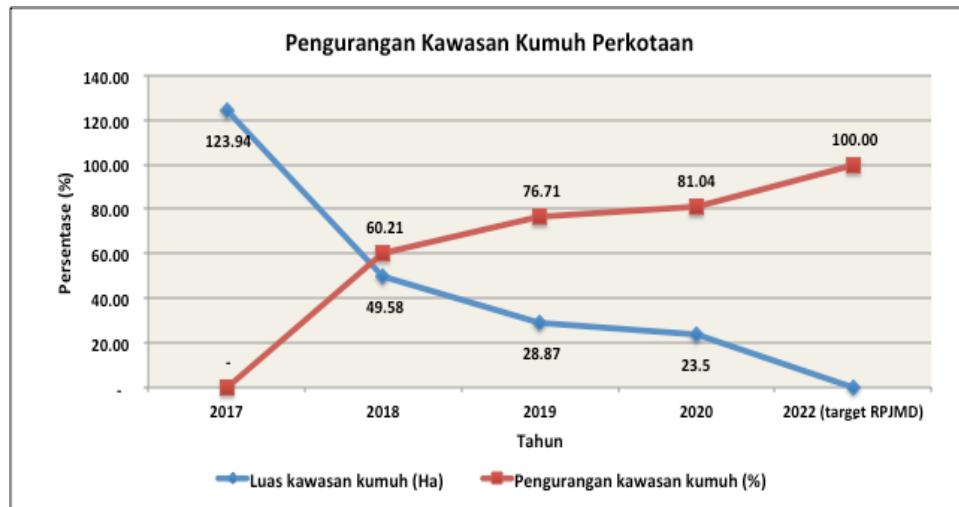
Analisis Pencapaian Sasaran 19

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Penduduk yang mengakses Air Bersih	%	100.00	96,81	92,47	95,52	92,47
2	Pengurangan kawasan Kumuh Perkotaan	%	100.00	48,57	86,78	178,67	86,78
3	Penduduk yang memiliki sanitasi layak	%	100.00	93,91	91,84	97,80	91,84
Rata-rata Capaian Kinerja				123.99		90.36	

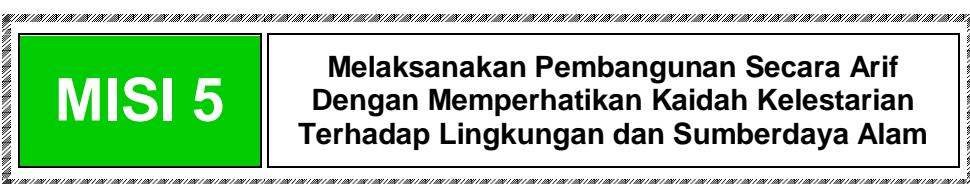
Untuk indikator kedua yaitu pengurangan kawasan kumuh perkotaan merupakan target nasional yang ditargetkan harus tidak ada kawasan kumuh pada tahun 2019, meskipun pada kenyataannya hal itu sulit untuk dicapai. Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/900/KUM/2017 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Dalam Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa Kawasan Kumuh Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah seluas 123,94 Ha. Pada tahun 2021 berdasarkan data Progam Kotaku jumlah luas penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 86.78% dari total keseluruhan luas kawasan kumuh atau masih tersisa 13.22% (16,38 ha) yang harus diselesaikan. Jika dilihat perkembangan dari pengurangan kawasan kumuh di perkotaan sejak tahun 2018 yang merupakan tahun pertama RPJMD dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3.27. Kawasan kumuh perkotaan di Kab. HSU

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terjadi pengurangan kawasan kumuh yang sangat signifikan sejak awal tahun perencanaan RPJMD (tahun 2018). Pencapaian tersebut dikarenakan adanya program Kotaku yang pendanaannya bersumber dari APBN yang melakukan kegiatan penanganan kawasan kumuh dan dipadukan dengan kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.



Untuk mewujudkan Misi V ini dirumuskan dengan satu tujuan yang berupakan goal di akhir periode dan dua sasaran dengan target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Berikut capaian per sasaran :

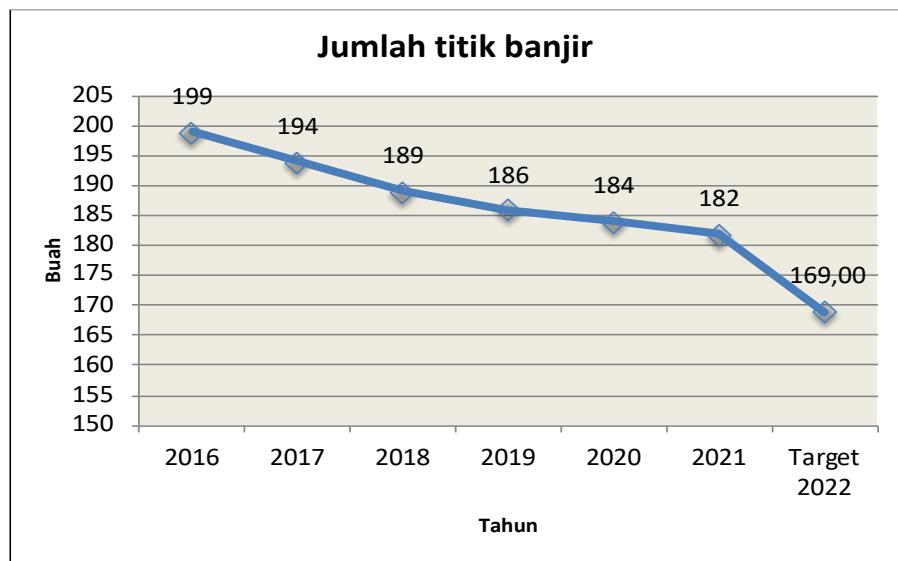
Sasaran 20 : Pengurangan Lokasi Banjir

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.35.
Analisis Pencapaian Sasaran 20
Pengurangan lokasi banjir

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2021			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Penurunan titik banjir		169	174	182	95.40	92.31
Rata-rata Capaian Kinerja				95.40		92.31	

Banjir merupakan sebuah momok yang hampir selalu terjadi setiap tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis yang berada di daerah rendah yang merupakan sebagian besar daerah rawa. Selain itu juga merupakan bagian hilir dari aliran sungai balangan dan sungai tabalong. Sehingga untuk menanggulangi masalah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kab. HSU, namun perlu kerjasama dengan kabupaten tetangga yang merupakan wilayah hulu dari DAS yang mengalir serta Pemerintah Provinsi Kalsel. Pada tahun 2021 capaian target pada indikator ini dinilai berhasil karena hampir tercapai 100%, dan masih perlu usaha untuk mencapai target RPJMD. Dengan menurunnya titik banjir diharapkan wilayah yang terdampak banjir juga berkurang sehingga kerugian materi maupun non materi dapat diminimalisir. Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan titik banjir.



Gambar 3.28. Jumlah titik banjir di Kab. HSU

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah titik banjir di wilayah Kab. HSU terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Ini artinya upaya-upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah cukup efektif untuk mengurangi titik-titik banjir, sehingga diharapkan dapat mengurangi luasan banjir dan dampak kerugian akibat banjir.

Sasaran 21 : Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan

Tabel 3.36.
Analisis Pencapaian Sasaran 21
Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun 2020			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW	%	99.95	99,95	99,75	99,80	99,80
2	Indeks Kualitas Udara		69	70,00	89,40	127,71	129,57
3	Indeks Kualitas Air		45	45,00	55,00	122,22	122,22
Rata-rata Capaian Kinerja					116.58	117.20	

Untuk melihat kualitas dan kelestarian lingkungan ada tiga indikator yang dijadikan target seperti yang tertera di atas. Rata-rata capaian kinerjanya lebih dari 100% atau sangat berhasil. Indikator Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air telah mencapai target RPJMD. Kondisi ini diharapkan bisa dipertahankan bahkan lebih diperbaiki lagi. Untuk indikator ketiga karena juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga sudah dibahas pada bagian 3.2.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .

Pemanfaatan lahan dan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana dalam penyusunannya telah mempertimbangkan berbagai hal termasuk lingkungan. Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW pada tabel di atas terlihat hampir mencapai target yang ditetapkan atau dinilai berhasil. Belum sempurnanya capaian ini dikarenakan terdapatnya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara yang saat ini masih berlaku dan belum dilakukan revisi. Penetapan besaran target persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW Kab. HSU Tahun 2018 sudah memperkirakan terjadinya Revisi RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah di sahkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan lahan sudah sesuai dengan peruntukannya di rencana tata ruang. Dalam pencapaian target kinerja pemanfaatan lahan ini maka kedepan diusahakan agar mempercepat proses revisi dan penetapan Perda RTRW. Dengan adanya perda RTRW yang baru diharapkan nantinya pencapaian indikator kinerja utama dapat sejalan dengan

target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara. Indikator yang digunakan adalah Indeks kualitas udara dan indeks kualitas air. Indeks kualitas udara dari target yang ditetapkan pada 2021 sebesar 70,00 ternyata berdasarkan hasil pengukuran terjadi peningkatan 19,40 point atau menjadi 89,40. Pengelompokan angka dan kategori berdasarkan indeks standar pencemar udara (ISPU) masuk rentang indeks 51-100 yang termasuk dalam kategori cemar sedang. Indikator indeks kualitas udara yang ditargetkan sampai akhir periode renstra (2022) adalah pada angka 69 dengan capaian realisasi kinerja nilai indeks 89,40. Jika diperhatikan nilai indeks kualitas udara tahun 2020 yang mencapai 89,11 menunjukkan naiknya nilai indeks dengan selisih target capaian renstra (2022) adalah 20,11. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten secara keseluruhan untuk melakukan upaya-upaya karena semakin tinggi nilai indeks maka kualitas udara semakin sehat.

3.1 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 dengan APBD sebesar **Rp. 1.589.099.699.366,00**. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.215.368.679.121,53** atau sebesar **76,49%**. Untuk lebih jelasnya penerimaan dan pengeluaran APBD Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3..... Laporan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2021

No	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Unaudited)	REALISASI 2021 (Unaudited)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.196.914.567.805,00	1.096.447.135.019,81	91,61
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	130.255.414.218,00	107.032.635.828,00	82,17
4.1.01	Pendidikan	17.455.250.000,00	16.049.431.893,00	91,95
4.1.02	Kesehatan	112.330.795.768,00	90.778.783.758,00	80,81
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.357.650,00	140.520.275,00	71,93
4.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	274.010.800,00	63.895.902,00	23,32
4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.095.129.800,00	1.076.941.550,00	98,34
4.2.09	Perhubungan	712.650.000,00	686.129.000,00	96,28
4.2.10	Komunikasi dan Informatika	82.479.800,00	90.410.550,00	109,62
4.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	300.000.000,00	300.402.000,00	100,13
4.3	Urusan Pilihan	2.993.654.750,00	3.034.306.420,00	101,36
4.3.01	Kelautan dan Perikanan	155.000.000,00	161.194.000,00	104,00
4.3.03	Pertanian	64.500.000,00	61.675.000,00	95,62
4.3.07	Perindustrian	2.774.154.750,00	2.811.437.420,00	100,34
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penujang	1.062.570.369.037,00	985.303.251.221,81	92,73
4.4.01	Admionistrasi Pemerintahan	15.000.000,00	7.785.000,00	51,90
4.4.04	Keuangan	1.062.089.194.037,00	984.544.965.636,81	92,74

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**Tahun 2021**

4.4.05	Kepegawaian	41.875.000,00	40.800.000,00	97,43
4.4.11	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	424.300.000,00	309.700.585,00	72,99
5	BELANJA DAERAH	1.589.009.699.366,00	1.215.368.679.121,53	76,49
5.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.041.147.434.463,00	733.088.671.145,92	70,41
5.1.01	Pendidikan	300.287.457.917,00	269.191.613.250,00	89,64
5.1.02	Kesehatan	544.570.747.387,00	299.585.653.823,00	55,01
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.548.247.677,00	129.182.917.340,92	83,59
5.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.546.740.800,00	13.028.779.207,00	88,95
5.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14.985.235.981,00	12.539.311.760,00	83,68
5.1.06	Sosial	12.109.004.701,00	9.560.395.765,00	78,95
5.2	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar	74.104.715.439,00	62.371.119.269,16	84,16
5.2.01	Tenaga Kerja	556.129.448,00	520.279.985,00	93,55
5.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.957.808.374,00	2.789.721.582,00	70,49
5.2.03	Pangan	3.357.369.296,00	2.766.392.124,00	82,40
5.2.04	Pertanahan	132.300.000,00	75.680.000,00	57,20
5.2.05	Lingkungan Hidup	7.162.782.459,00	5.238.222.400,00	73,13
5.2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.099.653.461,00	3.650.458.340,00	71,58
5.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.800.070.561,00	10.796.966.853,16	91,50
5.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.787.216.050,00	8.596.208.542,00	87,83
5.2.09	Perhubungan	6.117.890.631,00	4.131.392.392,00	67,53
5.2.10	Komunikasi dan Informatika	7.681.829.723,00	7.173.824.827,00	93,39
5.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	593.651.500,00	302.629.250,00	50,98
5.2.12	Penanaman Modal	3.732.481.475,00	3.102.726.730,00	83,13
5.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	9.342.280.672,00	8.850.606.393,00	94,74
5.2.14	Statistik	105.230.000,00	100.225.000,00	95,24
5.2.15	Persandian	84.608.750,00	62.544.000,00	73,91
5.2.16	Kebudayaan	346.902.625,00	343.841.500,00	99,12
5.2.17	Perpustakaan	3.705.212.290,00	3.337.607.201,00	90,08
5.2.18	Kearsipan	541.288.125,00	530.792.150,00	98,06
5.3	Urusan Pilihan	34.803.141.044,00	28.102.151.957,84	80,75
5.3.01	Kelautan dan Perikanan	4.647.099.575,00	3.762.586.252,00	80,97
5.3.02	Pariwisata	235.324.375,00	220.918.750,00	93,88
5.3.03	Pertanian	19.144.596.043,00	16.144.830.844,00	84,33
5.3.06	Perdagangan	2.541.591.588,00	2.229.666.440,00	87,73
5.3.07	Perindustrian	8.234.529.463,00	5.744.149.681,84	69,76
5.4	Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang	438.954.408.420,00	391.807.736.738,61	89,26
5.4.01	Administrasi Pemerintahan	46.239.927.526,00	34.171.415.890,61	73,68
5.4.02	Pengawasan	8.714.685.600,00	7.458.458.753,00	85,58
5.4.03	Perencanaan	5.279.126.333,00	4.293.095.373,00	81,32
5.4.04	Keuangan	297.626.679.977,00	276.568.479.616,00	92,92
5.4.05	Kepegawaian	10.150.511.287,00	7.326.954.622,00	72,18
5.4.07	Penelitian dan Pengembangan	780.051.875,00	770.425.000,00	98,77
5.4.08	Sekretariat DPRD	38.856.749.049,00	33.165.701.693,00	85,35
5.4.11	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	26.325.765.767,00	23.452.034.355,00	89,08
5.4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.580.911.006,00	4.702.171.436,00	94,40
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.4.04.1	Penerimaan Pembiayaan	392.095.131.561,00	208.255.861.916,70	53,11
6.4.04.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	182.095.131.561,00	182.095.131.560,70	100,00
6.4.04.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	210.000.000.000,00	26.154.908.496,00	12,45

6.4.04.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.821.860,00	0,00
------------	--	------	--------------	------

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendapatan

Jumlah Pendapatan TA 2021 terealisasi sebesar Rp 1.096.447.135.019,81 atau mencapai 91,61% dari target dalam APBD sebesar Rp 1.196.914.567.805,00. Jumlah Pendapatan tersebut terdiri dari :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan sebesar Rp. 16.049.431.893,00
2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan sebesar Rp. 90.778.787.758,00
3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 140.520.275,00
4. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan sebesar Rp. 686.129.000,00
5. Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 90.410.550,00
6. Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp. 300.402.000,00
7. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 161.194.000,00
8. Urusan Pilihan Pertanian sebesar Rp. 61.675.000,00
9. Urusan Pilihan Perindustrian sebesar Rp. 2.811.437.420,00
10. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan sebesar Rp. 7.785.000,00
11. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan sebesar Rp. 984.944.965.636,81
12. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian sebesar Rp. 40.800.000,00
13. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan sebesar Rp. 309.700.585,00

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Jumlah Belanja Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp 1.215.368.679.121,53 atau mencapai 76,49% dari Anggaran APBD sebesar Rp 1.589.009.899.566,00. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal pada SKPD.

3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 208.255.861.916,70 atau mencapai 53,11% dari target dalam APBD sebesar Rp 392.095.131.561,00. Realisasi Penerimaan

Pembiayaan tersebut terdiri dari :

1. Jumlah Penggunaan SILPA sebesar Rp. 182.095.131.560,70
2. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 26.154.908.496,00
3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 5.821.860,00

4. Effesiensi Anggaran

Dalam hal effesiensi program dan kegiatan serta anggaran telah dilakukan melalui awal tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), yang mana program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian target tujuan dan sasaran yang dapat diakomodir dalam dokumen anggaran SKPD.

Untuk penyediaan anggaran dari tahun 2021 atau tahun ke-4 RPJMD 2017-2022 telah mulai dilaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang setiap permintaan anggaran oleh SKPD harus sesuai dengan tujuan dan sasaran Kabupaten yang termuat dalam RPJMD.

Pada tahun 2021 ini realisasi capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 99,86% dan realisasi capaian dari Indikator Kinerja Sasaran sebesar 92,93% sedangkan realisasi kinerja anggaran sebesar 76,49%. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara selektif untuk mencapai keberhasilan kinerja pada setiap skpd di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan kata lain selarasnya tingkat keberhasilan kinerja dengan realisasi anggaran menunjukan efesiensi penggunaan anggaran.

Untuk lebih efisiennya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan maka kedepanya akan dilakukan perbaikan berupa :

1. Lebih selektif lagi dalam pembahasan rancangan Renja pada SKPD,
2. Konektivitas antara Perencanaan dengan Penganggaran,
3. Mengurangi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak mendukung langsung terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Dalam hal efesiensi dan transparansi anggaran telah diterapkan secara bertahap transaksi non tunai pada setiap SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019.



PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara dan masyarakat serta ditambahnya kondisi *pandemi covid-19* yang sampai saat ini belum berakhir bahkan kasusnya terus meningkat.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022, total keseluruhan indikator yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah **14 (Empat Belas) indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **43 (Empat Puluh Tiga) indikator kinerja sasaran**. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 Secara keseluruhan dinyatakan berhasil, untuk capaian **14 (empat belas)** indikator IKU yang telah ditetapkan, capaian **5 (lima)** indikator nya dinyatakan **Sangat Berhasil**, capaian **5 (empat)** indikatornya dinyatakan **Berhasil**, capaian **1 (satu)** indikatornya dinyatakan **Cukup Berhasil**, dan capaian **3 (tiga)** indikatornya lagi dinyatakan **Kurang Berhasil**.

Dari 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan , sebanyak :

- ✓ **14 (empat belas) indikator dinyatakan Sangat Berhasil**,
- ✓ **18 (delapan belas) indikator dinyatakan Berhasil**, dan
- ✓ **4 (empat) indikator lainnya dinyatakan Cukup Berhasil**, dan
- ✓ **7 (tujuh) indikator lainnya dinyatakan Kurang Berhasil**

Secara keseluruhan rata-rata capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 dapat dinyatakan telah berhasil. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti;

1. Penguatan kapasitas dan kesungguhan pejabat eselon III dan IV dalam pencapaian sasaran strategis pada seluruh SKPD,
2. Melaksanakan evaluasi kinerja berjenjang dan berkala,
3. Menyempurnakan dokumen perencanaan.

Adapun kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi antar SKPD akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan seluruh SKPD terkait dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat sehingga pada nantinya dapat mewujudkan Hulu Sungai Utara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif.

HSU Sukses Turunkan Angka Pernikahan Dini, Abdul Wahid Terima Penghargaan LKBN Antara

Rabu, 9 Januari 2019 19:28



HO/Humas dan Protokol Pemkab HSU

Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid dan istri menerima penghargaan dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara pada acara HUT ke-81 LKBN Antara di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (09/01/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid menerima penghargaan dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara pada acara HUT ke-81 LKBN Antara di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (09/01/2018).

Tribunhulusungaiutara.com

Jumat, 22 Maret 2019

Cari

Netv

Home News Pemilu Kalsel Super Ball Sport Bisnis Komunitas Serambi Ummah Vi

Bertakwa

Bupati HSU Abdul Wahid Menerima Penghargaan Sertifikat Adipura

Senin, 14 Januari 2019 19:54



Bupati HSU H Abdul Wahid HK menerima penghargaan sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Auditorium Dr Soejanvo Gedung Manggala Wanabakti Senin (14/01/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Bupati HSU H Abdul Wahid HK menerima penghargaan sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Penyerahan Penghargaan Adipura dan Green Leadership oleh Wakil Presiden RI H Jusuf Kalla di Auditorium Dr Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti Senin (14/01/2019).

PEMERINTAHAN

BUPATI HSU RAIH ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

 Dinas Kominfo HSU  20 Desember 2018  no comment  No tags



Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Abdul Wahid menerima anugerah penghargaan Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya dari Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas pembangunan pengarusutamaan gender didaerahnya.

PEMERINTAHAN

BUPATI HSU TERIMA PENGHARGAAN SATYALENCANA PEMBANGUNAN 2018

 Dinas Kominfo HSU 6 Juli 2018 no comment No tags



Amuntai – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Abdul Wahid HK bersyukur Kabupaten HSU mendapat penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKPK) dari Presiden RI tahun 2018.

Hal tersebut diungkapkannya usai menerima penghargaan pada gelaran puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-25 di Aula Gubernur Kota Manado Sulawesi Utara, Jum'at malam (6/6).

Hulu Sungai Utara raih Puskesmas terbaik

Pewarta : **Eddy Abdillah** ⌂ Selasa, 27 November 2018 13:18 WIB



Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Puskesmas Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara meraih penghargaan sebagai Puskesmas berprestasi pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 se Kalimantan Selatan.

Penghargaan dan tropi diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan didampingi Sekda Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie dan Kepada Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim pada penutupan Jambore kader posyandu sekaligus puncak Peringatan HKN di Ballroom Hotel Rattan in Banjarmasin belum lama ini.

Beberapa prestasi juga diraih HSU pada acara tersebut melalui program kesehatan seperti bidang tenaga kesehatan teladan, Dokter Gigi, Kesehatan Lingkungan, Bidan Desa teladan dan program pemanfaatan tanaman obat keluarga (toga) bagidesa.

Ketua TP PKK HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid di Amuntai Senin menyatakan kegembiraan dan ucapan terima kasih atas prestasi yang diraih bidang kesehatan.

Hulu Sungai Utara Raih WTP Ketiga

Pewarta : [Eddy Abdillah](#) ⏲ Senin, 8 Oktober 2018 21:56 WIB



Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid didampingi Kepala BKAD H.Suyudi menerima sertifikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala BPPN Tabalong Bayu Setiawan di Amuntai senin. (Eddy Abdillah)

Amuntai (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Pemerintah atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 2017.

Sertifikat Penilaian Wajar Tanpa Pemgecualian (WTP) diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid dari Kepala KPPN Tanjung Bayu Setiawan Yuniarto di Amuntai Senin.

Penyerahan sertifikat WTP turut disaksikan perwakilan Kementerian Keuangan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Viera Martina yang datang mendampingi Kepala KPPN serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah HSU drh. H. Suyadi.

PEMERINTAHAN

KEARSIPAN HSU PERINGKAT DUA HASIL PENGAWASAN TINGKAT NASIONAL

 Dinas Kominfo HSU 6 Maret 2019 no comment No tags



Amuntai – Pembangunan bidang kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang dimentori Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali berada di peringkat kedua untuk kategori Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2018.

Sertifikat penghargaan dari hasil pengawasan kearsipan 2018 ini diserahkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan KemenPAN-RB Rini Widayantini kepada isteri Bupati HSU Hj Anisah Rasyidah pada rakor pengawas kearsipan nasional di Sumatera Barat, Rabu (27/2).

Penyerahan sertifikat disaksikan Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan, Ketua Pusat Akreditasi Arsip selaku ketua panitia Rudi Anton, Kepala Dispersip HSU Hj Lailatanur Raudah, dan para kepala daerah Bupati/Walikota se-Indonesia.

Bertakwa

HSU Raih Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya

Selasa, 24 Juli 2018 17:58



istimewa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali meraih penghargaan yang juga berkat kerjasama dengan seluruh pihak dan masyarakat.

Setelah berhasil meraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI Joko Widodo yang diterima Bupati HSU H Abdul Wahid HK 7 Juli 2018 yang lalu, Kabupaten HSU kembali berhasil meraih penghargaan yang sangat membanggakan.

Penghargaan yang berhasil diraih adalah penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Bahkan penghargaan kali ini meningkat dari penghargaan KLA kategori Pratama menjadi Penghargaan KLA Kategori Madya.

HSU MANTAP

HSU Kembali Raih Penghargaan KLA, Bupati Wahid Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak

Rabu, 24 Juli 2019 20:56



HO/Humas Pemkab HSU

Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yambise, saat menyerahkan penghargaan kepada Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Rabu (24/7/2019)



BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Penganugerahan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2019 digelar di Hotel Four Point Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/7/2019).

Dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yambise, kegiatan ini juga diikuti para deputy Kementerian PPPA beserta jajaran, gubernur, bupati dan walikota se Indonesia.

Dalam penganugerahan tahun ini, Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi salah satu kabupaten yang kembali berhasil mendapatkan penghargaan KLA.

Bila sebelumnya penghargaan KLA yang didapatkan HSU pada kategori pratama, maka untuk tahun ini predikat KLA yang didapatkan HSU meningkat menjadi kategori madya.

Selain kembali berhasil meraih penghargaan KLA, dalam ajang ini penghargaan lain juga didapatkan Bupati HSU H Abdul Wahid HK.

Dalam upayanya mewujudkan daerah layak anak, Bupati Wahid mendapatkan penghargaan sebagai Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Menteri PPPA.

HSU Mantap

Sukses Turunkan Stunting, Bupati HSU H Abdul Wahid HK Raih Penghargaan

Kamis, 10 Oktober 2019 17:26



Bupati HSU H Abdul Wahid HK saat menerima piagam WTP 1.

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Penghargaan kembali didapat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), H Abdul Wahid HK.

Kali ini diraih atas kinerjanya dalam pelaksanaan Konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Kamis (10/10) di Gedung DR KH Ideham Khalid Banjarbaru, dengan disaksikan bupati/walikota se Kalsel dan tamu undangan lainnya.

PEMKAB HSU RAIH PENGHARGAAN SAKIP PREDIKAT B

 Dinas Kominfo HSU ⌚ 30 Januari 2020 🗨 no comment 🔖 No tags



AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid HK bersyukur dan bangga atas tercapainya Kinerja Pemerintah Kabupaten HSU pada tahun 2019 dalam meraih penghargaan SAKIP dengan predikat B dari Menpan RB.

Daerah Hulu Sungai Utara

HSU Kembali Raih Penghargaan Adipura

⌚ 2 Januari 2020 📸 matabanua



TERIMA KUNCI – Bupati HSU H Abdul Wahid HK menerima kunci kendaraan roda empat disela menerima penghargaan Adipura.(yusuf)

AMUNTAI – Bupati HSU H Abdul Wahid HK bersyukur dan bangga, karena Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), tahun 2019 ini kembali meraih penghargaan Adipura daerah.

“Penghargaan ini yang kita terima yang ketiga kalinya yang diraih oleh Kabupaten HSU,” ujarnya Bupati HSU, kemarin. Ia berharap, dengan adanya prestasi yang diraih ketiga kalinya ini, dapat dipertahankan dimasa yang akan datang.

Beranda > Daerah > Pemkab Hulu Sungai Utara Raih Penghargaan Bidang Kearsiapan

Pemkab Hulu Sungai Utara Raih Penghargaan Bidang Kearsiapan

Penulis [klikkalsel.com](#) - 27 Februari 2020, 21:44



Penghargaan diserahkan Menpan RB, Tjahjo Kumolo, didampingi Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M Taufik, dan diterima langsung Bupati Hulu Sungai Utara H Abdul Wahid HK, di Surakarta, Jawa Tengah.(foto : istimewa)

AMUNTAI, klikkalsel.com – Bupati Hulu Sungai Utara H Abdul Wahid HK, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian dibidang kearsipan yang diraih.

Rasa syukur itu disampaikannya usai menerima penghargaan dibidang kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2019 dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Lebih Lanjut, Abdul Wahid menyampaikan, penghargaan di bidang kearsipan dengan predikat sangat memuaskan dan dengan nilai 90,10 (AA) tersebut merupakan sebuah capaian prestasi yang tinggi.